



STIE

**Widyawati
YOGYAKARTA**

MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA

(Survey pada Usaha Jajanan di Kota Yogyakarta)

**Drs. Mudasetia, M.M., Ak
Evi Rosalina Widyayanti, S.E., M.M
Ginto Yerens Elikh
Chyntia Puspita Anggraeni
Lubna Alia A Hasan
Anna Syarifatul Ummah**

MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA

**(Survey pada Usaha Jajanan di Kota
Yogyakarta)**

**Drs. Mudasetia, M.M.,Ak
Evi Rosalina Widyayanti, S.E.,M.M
Ginto Yerens Elikh
Chyntia Puspita Anggraeni
Lubna Alia A Hasan
Anna Syarifatul Ummah**



STIE Widya Wiwaha

Model Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Usaha (Survey pada Usaha Jajanan di Kota Yogyakarta)

Penulis:

Drs. Mudasetia, M.M.,Ak
Evi Rosalina Widyayanti, S.E.,M.M
Ginto Yerens Elikh
Chyntia Puspita Anggraeni
Lubna Alia A Hasan
Anna Syarifatul Ummah

ix, 111 hlm., 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-51174-7-3

Layouter : Agung Slamet Prasetyo, Arif Suwarjono

Diterbitkan STIE Widya Wiwaha
Alamat:
STIE Widya Wiwaha
Jl Lowanu Sorosutan UH VI/20
Yogyakarta
Telp. 0274 377091
Email: library@stieww.ac.id

Cetakan pertama, Desember 2018
Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Assalamu'alaikum w r.w b.

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian dengan baik dan lancar. Allah juga memberikan karunia sahabat-sahabat yang telah banyak membantu kelancaran penyelesaian laporan ini, sehingga semua dimudahkan dan selesai tepat pada waktunya. Penelitian dengan judul **Model Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Usaha (Survey pada Usaha Jajanan di Kota Yogyakarta)** memberi banyak hal positif bagi kami dan pihak-pihak yang terkait.

Penelitian ini mengangkat masalah-masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan dan penguatan usaha mikro yang selama ini masih menggunakan cara-cara konvensional. Namun tidak dipungkiri permasalahan yang dihadapi sangatlah kompleks sehingga memerlukan strategi pemberdayaan yang komprehensif dan berkesinambungan dengan cara membantu mereka dalam menghadapi faktor-faktor seperti Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, dan Kemitraan sehingga mampu menjadi pengusaha mikro yang berdaya dan pada akhirnya memiliki Kemandirian Usaha yang dapat membantu memperkuat perekonomian negara.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. BAPPEDA Pemerintah Kota Yogyakarta, yang telah memberikan hibah dalam pembiayaan.
2. Ketua STIE Widya Wiwaha yang menjadi penanggung jawab kami
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Widya Wiwaha yang membantu memfasilitasi hingga selesainya penelitian ini.
4. Para Pelaku Usaha Mikro yang telah membantu kelancaran proses pengambilan sampel.
5. Semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terselesainya penelitian ini.

Banyak hal yang dapat kami pelajari selama proses penelitian ini dan masih banyaknya ketidak sempurnaan yang kami lakukan akan menjadi evaluasi bagi kami sehingga kami akan menerima dengan lapang dada segala bentuk kritik dan saran yang diberikan. Besar harapan kami bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang banyak bagi pihak lain.

Wassalamu'alaikum w.r.w.b.

Penulis

RINGKASAN

Kota Yogyakarta sebagai kota wisata, budaya dan pendidikan menampung banyak pendatang dengan berbagai alasan yang berbeda-beda ketika datang ke Yogyakarta. Salah satunya bertujuan untuk berdagang dan diantara para pedagang ada pedagang kecil yaitu usaha jajanan. Kota Yogyakarta menjadi sasaran tempat mencari nafkah yang potensial ibaratnya berdagang apa saja pasti laku, termasuk usaha jajanan. Sangat beralasan karena pelajar dan mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta sangat banyak. Baik pelajar maupun wisatawan sangat potensial menjadi pasar untuk jajanan di Kota Yogyakarta. Para siswa di berbagai jenjang pendidikan, mahasiswa dan wisatawan menjadi target paling dirasa tepat bagi pelaku usaha jajanan. Meskipun terkadang jika dilihat dari berbagai sisi masih kurang ramah terhadap lingkungan lebih-lebih bagi kesehatan. Namun di balik itu semua usaha kecil atau UKM (Usaha Kecil Menengah) memiliki peran penting di Indonesia cukup membantu bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu pemberdayaan sangat penting untuk terus dikembangkan. Pemberdayaan usaha mikro merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan.. Masalah utama yang dihadapi adalah paradigma yang dianut oleh para pengusaha mikro yang cenderung bersifat konvensional, merasa puas dengan hasil yang dicapai. Hal ini akan berdampak pada lambatnya respon

terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu masalah rendahnya SDM dan minimnya modal yg mereka miliki juga menjadi hambatan. Melihat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha mikro, diperlukan strategi pemberdayaan usaha mikro yang komprehensif dan berkesinambungan, dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, memaksimalkan Peran Pemerintah, mendayagunakan Modal Usaha dan memperkuat jalinan Kemitraan, agar dihasilkan keunggulan bersaing sehingga mampu memberdayakan yang pada akhirnya dapat memandirikan usahanya. Kemandirian usaha mikro mempunyai sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi.

Besar harapannya agar usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri (usaha mikro itu sendiri) maupun orang lain (konsumen). Sehingga diharapkan pengembangan usaha mikro di kota Yogyakarta pada akhirnya akan menyentuh hingga masalah moralitas pelaku usaha (pelaku bisnis Etis)

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
RINGKASAN.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
Permasalahan	14
Rumusan Permasalahan.....	19
Batasan Masalah.....	26
Tujuan dan Manfaat Penelitian	27
Tujuan Penelitian	27
Manfaat Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	29
Penemuan yang lalu.....	29
Teori Yang Mendasari.....	35
Sumber Daya Manusia	42
Peran Pemerintah.....	43

Modal Usaha.....	46
Kemitraan.....	47
Pemberdayaan Usaha Mikro.....	50
Kemandirian Usaha	54
Ringkasan dan Kerangka Pikir Penelitian.....	62
Ringkasan	62
Kerangka Pikir Penelitian	66
Hipotesis	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	73
Pemilihan Subyek.....	73
Populasi dan Sampel.....	73
Sumber, Pengumpulan dan Jenis Data	74
Desain dan Pendekatan Penelitian.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	82
Validasi Instrumen	82
Pengumpulan dan Penyajian Data	83
Analisis data	86
Analisis Regresi Berganda	86
Analisis Uji Hipotesis	89
Hasil Analisis	100

Model	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
Kesimpulan	104
Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	16
Tabel 2 Data Berdasarkan Kependudukan	85
Tabel 3 Data Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	86
Tabel 4 Data Berdasarkan Lokasi Jualan	86
Tabel 5 <i>Coefficient Regresi</i>	87
Tabel 6 <i>Output Item Total Correlations</i> pada Variabel Sumber Daya Manusia	90
Tabel 7 <i>Output Item Total Correlations</i> pada Variabel Peran Pemerintah	90
Tabel 8 <i>Output Item Total Correlations</i> pada Variabel Modal Usaha	91
Tabel 9 <i>Output Item Total Correlations</i> pada Variabel Kemitraan	91
Tabel 10 <i>Output Item Total Correlations</i> pada Variabel Kemandirian Usaha	92
Tabel 11 <i>Correlations</i>	93
Tabel 12 <i>Output Reability Analysis</i> pada variabel Sumber Daya Manusia.....	94
Tabel 13 <i>Output Reability Analysis</i> pada variabel Peran Pemerintah	95
Tabel 14 <i>Output Reability Analysis</i> pada variabel Modal Usaha	95
Tabel 15 <i>Output Reability Analysis</i> pada variabel Kemitraan	96

Tabel 16 <i>Output Reability Analysis</i> pada variabel Kemandirian Usaha	96
Tabel 17 <i>Output Reability Analysis</i> pada variabel Kemandirian Usaha	97
Tabel 18 <i>Anova</i> (F hitung)	98
Tabel 19 <i>Descriptive Statistik</i>	99
Tabel 20 <i>Coeffisient (t hitung)</i>	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin	17
Gambar 2 Model Penelitian	68
Gambar 3 Model Pemberdayaan Usaha Mikro.....	102

BAB I PENDAHULUAN

Permasalahan

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah propinsi DIY, Dengan Luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa dengan kepadatan rata-rata 13, 177 jiwa/km². Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². (Sumber data dari SIAK per tanggal 28 Feb 2013)

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata dipenuhi oleh banyak pendatang dimana kota ini menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah baik Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri maupun daerah lain di Indonesia. Homogenitas masyarakat yang datang ke Yogyakarta dengan berbagai tujuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tujuan untuk pendidikan, wisata, berdagang mulai dari pedagang kecil hingga besar, investasi dll. Kedatangan mereka ke kota Yogyakarta ada yang sekedar berkunjung namun ada yang menetap hingga akhirnya menjadi penduduk kota Yogyakarta, sehingga mampu menambah

kepadatan penduduk kota Yogyakarta. Sebagai tujuan perdagangan kota Yogyakarta sangat menjanjikan keuntungan bagi siapa saja yang berbisnis di kota ini. Tidak terlepas mereka para pelaku usaha mikro yang datang dari berbagai daerah asal. Untuk para pelaku usaha kecil memiliki target market yang cukup besar yaitu kepada mereka para wisatawan dan para pelajar dari tingkat dasar hingga menengah atas bahkan para mahasiswa di Yogyakarta.

Data dari penelitian LIPI memberikan hasil yang sangat mengejutkan ketika ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi se-Jawa. Meski rasanya tidak mungkin, faktanya meski menyandang status Daerah Istimewa angka kemiskinan DIY ternyata tak kalah "istimewa". Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkini pada September 2013 menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di DIY sebesar 15,03%. Angka tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012. Namun tingkat kemiskinan di DIY tetap menjadi yang terbesar di antara seluruh Provinsi di Jawa. Sebagai gambaran DKI Jakarta yang dikenal memiliki banyak penduduk miskin kota persentase kemiskinannya sebesar 3,72%. Sementara Banten yang dikenal sebagai salah satu provinsi tertinggal memiliki angka kemiskinan 5,89%. DIY pun masuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia.

Tabel 1

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2013

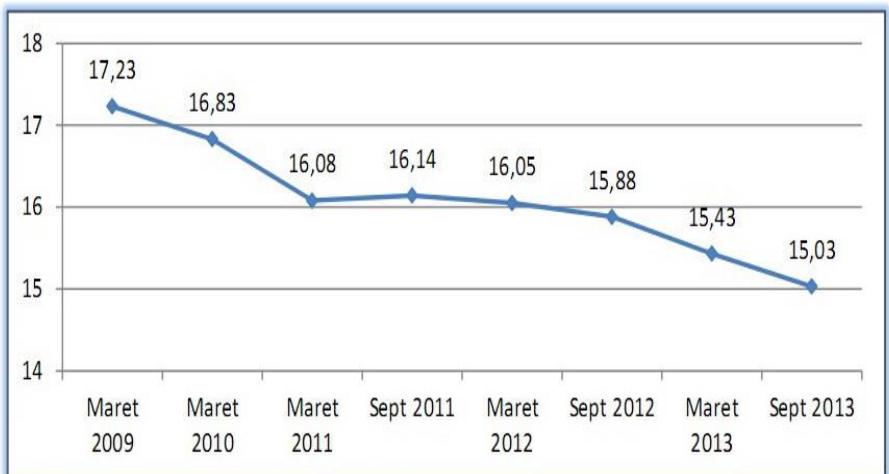
Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)			Garis Kemiskinan (Rp/kapita/		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota
Aceh	156,80	698,92	855,71	11,55	20,14	17,72	374 261	337 962	34
Sumatera Utara	689,21	701,59	1 390,80	10,45	10,33	10,39	330 517	292 186	31
Sumatera Barat	124,89	255,74	380,63	6,38	8,30	7,56	360 768	321 252	33
Riau	162,71	359,82	522,53	6,68	9,55	8,42	366 057	339 829	35
Jambi	106,36	175,20	281,57	10,41	7,54	8,42	369 835	280 660	30
Sumatera Selatan	375,96	732,25	1 108,21	13,28	14,50	14,06	328 335	270 166	29
Bengkulu	97,66	222,75	320,41	17,29	17,97	17,75	358 294	313 265	32
Lampung	222,75	911,53	1 134,28	10,89	15,62	14,39	326 468	284 504	29
Bangka Belitung	23,07	47,83	70,90	3,47	6,97	5,25	416 935	436 899	42
Kepulauan Riau	95,34	29,68	125,02	5,79	9,21	6,35	405 578	364 773	39
DKI Jakarta	375,70	-	375,70	3,72	-	3,72	434 322	-	43
Jawa Barat	2 626,16	1 756,49	4 382,65	8,69	11,42	9,61	281 189	268 251	27
Jawa Tengah	1 870,73	2 834,14	4 704,87	12,53	16,05	14,44	268 397	256 368	26
DI Yogyakarta	325,53	209,66	535,18	13,73	17,62	15,03	317 925	275 786	30
Jawa Timur	1 622,03	3 243,79	4 865,82	8,90	16,23	12,73	278 653	269 294	27
Banten	414,46	268,25	682,71	5,27	7,22	5,89	300 109	264 632	28
Bali	105,14	81,38	186,53	4,17	5,00	4,49	298 449	261 613	28
Nusa Tenggara Barat	364,08	438,37	802,45	18,69	16,22	17,25	299 886	263 107	27

Data BPS terbaru pada September 2013 tentang jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia menurut Provinsi. DIY dengan persentase kemiskinan 15,03% menjadi yang tertinggi se-Jawa (www.bps.go.id)

Ada sekitar 535 ribu penduduk miskin di DIY yang sebagian besar di antaranya justru berada di kota yakni 325 ribu sementara 209 ribu adalah penduduk miskin desa. Definisi penduduk miskin menurut BPS sendiri adalah penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu garis kemiskinan di DIY pada periode yang sama sesuai berita statistik BPS Provinsi DIY sebesar Rp. 303.843.

Gambar 1

**Persentase Penduduk Miskin
di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2009 - September 2013**



Sumber: Susenas Maret 2009 - September 2013

Sumber dari Kompasiana tahun 2013 memberikan informasi sebagai berikut

Menurut Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY pertumbuhan ekonomi wilayah ini pada 2013 diperkirakan sebesar 4,5%-5,5% yang meski melambat tapi tetap tinggi. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY. Besarnya persentase penduduk miskin di DIY tak bisa ditutupi meski selama ini boleh jadi tertutup oleh sejuta pesona DIY. Beberapa aspek kehidupan masyarakat yang diduga menyebabkan tingginya kemiskinan di DIY adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal. Menariknya faktor pendidikan yang selama ini dianggap sebagai salah satu faktor jamak yang mempengaruhi pola pikir masyarakat memicu menguatnya mata rantai kemiskinan sepertinya kurang berlaku di DIY. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY justru tertinggi ketiga se-Indonesia setelah Riau dan DKI Jakarta. Dengan demikian masalah kemiskinan di DIY bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan atau hambatan cara pandang masyarakatnya melainkan masalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk DIY. Tingginya kemiskinan di DIY diduga kuat akibat dari lesatan pertumbuhan sektor perekonomian yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu. Sektor ekonomi yang memiliki peranan terbesar dalam perekonomian DIY tahun 2013 adalah hotel, restoran dan perdagangan yang

terkait yakni sebesar 20,75%. Sementara sektor yang diharapkan mampu menyerap memberikan gbanyak tenaga kerja seperti industri pengolahan dan pertanian masing-masing hanya 14,45 dan 12,99%.

Data ini seakan tegas berbicara di balik megahnya pesona Yogyakarta tersimpan derita penduduknya yang diam-diam sangat mengkhawatirkan. Kontribusi sektor pariwisata yang selama ini menjadi primadona DIY pun menjadi bisa dipertanyakan.

Rumusan Permasalahan

Melihat fakta yang demikian tingginya angka kemiskinan di DIY tidak hanya menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah setempat. Kemiskinan ini juga menjadi tantangan besar bagi sejumlah perguruan tinggi yang ada di DIY untuk merumuskan konsep sekaligus membantu pemerintah DIY mengimplementasikan pembangunan sosial ekonomi DIY yang berpusat pada kemandirian manusia. Fakta lain dari keadaan tersebut adalah bahwa kemiskinan penduduk DIY yang notabennya memiliki lima kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul dan kabupaten Kota Yogyakarta penduduk miskin tersebar di semua wilayah tersebut, namun Kota Yogyakarta menjadi tumpahan bagi mereka yang mencari nafkah dikota sebagai pedagang kecil/pelaku usaha mikro, sehingga

mengakibatkan mudahnya ditemukan penjual jajanan di kota Yogyakarta yang mereka berasal dari luar kota Yogyakarta seperti berasal dari Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul meski juga tidak sedikit mereka yang datang dari luar daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur bahkan dari luar Jawa, dimana mereka menjadi beban bagi pemerintah kota Yogyakarta karena kehidupan ekonomi mereka yang belum mandiri secara ekonomi.

Melihat Permasalahan diatas dapat dirumuskan bahwa dalam penelitian ini akan diangkat mengenai bagaimana pelaku usaha mikro dapat menjadi pelaku usaha yang mandiri, faktor apa sajakah yang mempengaruhi? Dan berdasarkan permasalahan yang ada mendasari penelitian ini dilakukan survey pada Jajanan di kota Yogyakarta. Dimana usaha jajanan dapat dikategorikan sebagai usaha mikro. Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-. Ciri-ciri usaha mikro: Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga

dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang; Tidak sensitive terhadap suku bunga; Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter; Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

Seperti halnya usaha kecil atau UKM (Usaha Kecil Menengah) peran Usaha mikro di Indonesia cukup membantu bagi

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu pemberdayaan usaha mikro sangat penting untuk terus dikembangkan sehingga dengan demikian dapat menjadi topik penelitian yang cukup menarik untuk di dikembangkan. Pemberdayaan usaha mikro merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Dengan potensi yang ada dan didukung oleh tersedianya sumber daya lokal, usaha mikro cukup memberikan arti bagi perkembangan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Termasuk sumbangan usaha kecil Indonesia terhadap penyerapan tenaga kerja dimana mencapai 40% (Awal Satrio,2006).

Disisi lain masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan dan penguatan usaha mikro adalah paradigma yang dianut oleh para pengusaha mikro yang cenderung bersifat konvensional, merasa puas dengan hasil yang dicapai. Hal ini akan berdampak pada lambatnya respon terhadap perubahan yang terjadi. Masalah penting lainnya yang harus dipecahkan dalam pengembangan usaha mikro adalah masalah kualitas sumberdaya manusia, dan masalah keterbatasan modal.

Dalam berbagai konsep strategi bersaing dikemukakan bahwa keberhasilan suatu usaha sangat tergantung pada kemampuan yang dimiliki atau lingkungan internal (Haar, 1995; Moini, 1995; Hine dan Kelly, 1997).. Melihat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha mikro, strategi

pemberdayaan usaha mikro yang komprehensif dan berkesinambungan dengan cara menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, pembinaan, pelatihan, pendampingan, pengembangan, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan perlu dilakukan secara simultan agar dihasilkan keunggulan bersaing yang pada akhirnya dapat memandirikan usaha mikro itu sendiri. Kemandirian usaha mikro mempunyai sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Besar harapannya agar usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha kecil bahkan usaha menengah.

Sejarah mencatat bahwa krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada kurun waktu 1997-1998 merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan yang harus gulung tikar karena tidak sanggup menanggung beban operasional yang meningkat drastis. Melemahnya sistem perekonomian Indonesia ditandai dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan semakin banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada waktu itu diharapkan para ekonom berpandangan positif karena di dalam krisis terkandung Peluang jika terus didasarkan pada kerangka kerja yang membumi (Dyah, Hermawan, 1999). Dari Krisis inilah munculnya para pengusaha kecil Menengah dan Mikro yang semakin terus berkembang pesat namun harus terus dilakukan pemberdayaan yang signifikan.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha dalam prakteknya dihadapkan pada banyak kendala. Kendala utama adalah paradigma yang dianut oleh para pelaku usaha yang cenderung konvensional, sehingga merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai. Merasa puas dengan hasil yang dicapai ini berdampak pada lambatnya respon yang diberikan terhadap tuntutan perubahan. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma dalam mengelola bisnis, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan, khususnya persaingan yang semakin tajam.

Selain kendala paradigma, masalah lain yang sering menghambat pemberdayaan usaha mikro adalah masalah iklim usaha yang kurang kondusif yang disebabkan oleh terbatasnya akses permodalan, informasi dan pemasaran. Lemahnya sistem pembinaan dan pengembangan usaha juga menjadi kendala dalam pemberdayaan, pemerintah kurang memberikan perhatian di bidang ini. Pembinaan yang diperlukan adalah yang bersifat kontinyu dan permanen, sampai usaha ini benar-benar berkembang menjadi usaha berskala lebih besar sehingga menjadi lebih kuat.

Masalah lain yang harus dihadapi dalam pemberdayaan usaha kecil adalah pembiayaan dan penjaminan, akses dana yang sangat terbatas dan tidak adanya lembaga penjamin menjadikan usaha mikro kesulitan dalam hal permodalan. Selain itu, usaha kecil harus menjalin kemitraan dengan usaha yang lebih besar

untuk mempermudah bantuan permodalan dan teknologi, dengan kemitraan yang luas, sangat dimungkinkan usaha mikro akan tumbuh menjadi usaha yang lebih kuat dengan dukungan modal serta teknologi dari para mitra usahanya.

Upaya membangun usaha bukan pekerjaan yang mudah. Banyak faktor yang harus dikembangkan agar usaha mikro dapat tetap eksis di pasar sasaran. Strategi pemberdayaan yang komprehensif dengan cara menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan perlu dilakukan secara simultan dalam upaya memperkuat lingkungan internal dan membentuk keunggulan bersaing. Banyak teori yang menekankan betapa pentingnya kualitas lingkungan internal dalam mengatasi persaingan dan menjamin kemandirian usaha mikro. Berdasarkan semua itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengupayakan kemandirian para pelaku usaha mikro, sehingga penelitian ini diangkat dengan judul “**Model Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Usaha (survey pada Usaha Jajanan Kota Yogyakarta)**”

Melalui beberapa faktor yang menjadi Variabel penelitian dapat dirumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemberdayaan melalui Faktor Sumber Daya Manusia akan mempengaruhi Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Yogyakarta?

2. Apakah pemberdayaan melalui Faktor Peran Pemerintah akan mempengaruhi Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Yogyakarta?
3. Apakah pemberdayaan melalui Faktor Modal Usaha akan mempengaruhi Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Yogyakarta?
4. Apakah pemberdayaan melalui Faktor Kemitraan akan mempengaruhi Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Yogyakarta?
5. Apakah keempat faktor (Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan) saling berpengaruh dan secara bersama-sama mempengaruhi Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Yogyakarta?

Batasan Masalah

Penelitian ini ditulis berdasarkan batasan-batasan yang dibuat supaya penelitian ini tetap fokus dalam jalur penelitian yang diinginkan peneliti maka perlu dilakukan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Yogyakarta
2. Penelitian ini dilakukan survey pada usaha mikro tepatnya usaha jajanan di Kota Yogyakarta

3. Analisa Penelitian ini Fokus pada variabel-variabel independent yang ditentukan seperti Variabel Sumber Daya Manusia, Variabel Peran Pemerintah, Variabel Modal Usaha dan Variabel Kemitraan dan variabel dependent yaitu Kemandirian Usaha.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Melaksanakan salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Penelitian
- b. Mengetahui Variabel-variabel pemberdayaan yang diduga menjadi pengaruh terhadap Kemandirian Usaha Mikro di Kota Yogyakarta
- c. Membangun model Pemberdayaan usaha mikro yang lebih tepat dan baik pada penjual jajanan di Kota Yogyakarta. Model yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi acuan dalam pemberdayaan bagi kemandirian usaha kecil sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di Kota Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperluas literature tentang variabel-variabel pengaruh terhadap kemandirian usaha kecil, dan peningkatan kualitas bagi pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta
- b. Secara aplikatif dalam penelitian ini dapat bermanfaat:
 - Bagi pelaku usaha mikro yang tentu saja dapat langsung merasakan manfaatnya,
 - Bagi pemilik modal baik itu individu maupun perbankan
 - Bagi peneliti dapat membantu pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Wlayah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penemuan yang lalu

Penelitian terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah banyak dilakukan dengan tinjauan melalui berbagai sisi keterkaitan dengan berbagai unsur usaha maupun lembaga pendanaan seperti penelitian yang dilakukan oleh Ikin Solikin (2010) dengan judul "Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat" dengan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan secara global, telah memperoleh momentum dan toleransi masyarakat global dengan disepakatinya tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Dalam kaitan dengan peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, maka pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan tersebut secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Pemberdayaan/ pengembangan UKM menjadi hal yang penting dilakukan mengingat perannya yang cukup besar dalam perekonomian. Model pemberdayaan UKM banyak dikembangkan di berbagai wilayah dan negara sesuai dengan kondisi, potensinya dan tujuan model pemberdayaan yang dikembangkan. Untuk itu model pengembangan UKM yang sesuai adalah model pengembangan kluster berbasis pariwisata. Hal ini sesuai dengan kondisi dan potensi kota Bandung sebagai kota jasa/wisata. Model

ini juga dapat memberikan efek multiplier bagi masyarakat Bandung.

Sedangkan penelitian Usaha Mikro yang dilakukan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dicontohkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2008) melakukan kajian masalah dan kinerja industri kecil di Kabupaten Bantul Provinsi DIY. Survei dilakukan terhadap 100 pengusaha yang tergolong industri skala kecil dan menengah (IKM). Hasil kajian tersebut menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial terhadap pihak lain dan keterbatasan untuk menambah modal. Masalah lain yang dihadapi adalah menurunnya hasil produksi dan pemasaran hasil produksi. Dengan indikator kinerja tingkat produksi maka sebagian besar unit usaha (65%) mengalami penurunan, sedangkan 23% produksinya tetap, dan sebanyak 12% mengalami peningkatan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa para pengusaha pada skala IKM memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai sumber guncangan. Adanya bencana gempa bumi berdampak cukup besar terhadap kemampuan finansial perusahaan. Tarigan dan Susilo (2008) melakukan kajian masalah dan kinerja industri kecil pada industri kerajinan perak di Kota Yogyakarta. Dari hasil kajian tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa, pengusaha/pengrajin perak menghadapi permasalahan yang terkait dengan terganggunya kegiatan produksi karena adanya kerusakan bangunan serta prasarana produksi, terganggunya proses

produksi menyebabkan berkurangnya jumlah produksi yang berimplikasi pada kemampuan melayani permintaan, dan penurunan permintaan pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dan berimplikasi pada kemampuan memenuhi kewajiban finansial.

Dalam hal perbedaan masalah yang dihadapi tergantung dari jenis dan karakteristik industri kecil. Ada yang menyatakan masalah pokok yang dihadapi adalah kemampuan bersaing di pasar, pemasaran produk, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Dalam hal dinamika usaha, persamaan diantara mereka terutama dalam diversifikasi produk. Pengusaha industri kecil melakukan diversifikasi dari sisi bahan baku dan hasil produksi. Perbedaan dinamika usaha terjadi dalam hal diversifikasi usaha. Pengusaha industri kecil melakukan diversifikasi usaha yang berbeda sama sekali dengan usaha sebelumnya, namun juga ada yang melakukan diversifikasi usaha yang terkait dengan usaha sebelumnya (Ali dan Swiercz, 1991).

Sedangkan Susilo dan Krisnadewara (2007) menyatakan bahwa, berdasarkan hasil riset yang mereka lakukan tentang strategi bertahan industri pasca gempa di Yogyakarta, strategi yang bisa diterapkan untuk pengembangan UKM adalah memproduksi dengan fasilitas / peralatan terbatas, memproduksi dengan jumlah bahan baku terbatas, memproduksi dengan jumlah tenaga kerja terbatas, memproduksi dengan modal finansial terbatas, membuka *show-*

room/outlet, melakukan usaha sampingan. Rekomendasi dari hasil kajian ini berkaitan dengan upaya percepatan pemulihan kembali untuk berusaha adalah dengan melakukan kegiatan produksi kembali yang menekankan pada tambahan modal. Dengan tambahan modal maka berbagai keterbatasan dalam kegiatan produksi dapat diatasi, sehingga kegiatan produksi akan lebih lancar sehingga dapat meningkatkan pendapatan

Menurut Priyono (2004), pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi. *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang

(*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, juga merupakan tanggung jawab masyarakat, terutama mereka yang telah lebih maju, karena telah terlebih dahulu memperoleh kesempatan

bahkan mungkin memperoleh fasilitas yang tidak diperoleh kelompok masyarakat lain.

Studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) seperti dikemukakan dalam Sethuraman (1993), dijelaskan bahwa aktivitas-aktivitas UKM tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan: mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumberdaya lokal, usaha milik sendiri, opersinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. Studi yang dilakukan ILO ini menyebutkan sektor UKM punya ciri: ukuran usaha kecil, kepemilikan keluarga, intensif tenaga kerja, status usaha individu, tanpa promosi, dan tidak ada hambatan masuk.

Menurut Chris Manning, dkk (1991) sektor UKM adalah bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan atau telah menerima bantuan tetapi belum sanggup dikembangkan. Sektor UKM di Indonesia, umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Kegiatan usaha tidak terorganisasikan secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas/kelembagaan yang tersedia, tidak mempunyai izin usaha, pola kegiatan usaha tidak teratur baik

dalam arti lokasi maupun jam kerja, pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. Pada umumnya UKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat kegiatan usahanya. Berbagai hambatan tersebut meliputi kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM berkualitas, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, infrastruktur pendukung dan rendahnya komitmen pemerintah.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Edi Suandi Hamid dan Y. S menghasilkan kesimpulan sebagai berikut Dituliskan bahwa Dari hasil survei diperoleh beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi DIY, antara lain: (1) Pemasaran; (2) Modal dan pendanaan; (3) Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi; (4) Pemakaian bahan baku; (5) Peralatan produksi; (6) Penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja; (7) Rencana pengembangan usaha; dan (8) Kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapi UMKM, maka diperlukan strategi untuk mengatasinya.

Teori Yang Mendasari

Berdasarkan Undang-undang RI no 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dinyatakan dalam latar belakang bahwa pertama, Masyarakat adil dan makmur

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara RI Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Kedua, Amanat ketetapan MPR RI No. XVI Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi kerakyatan dan ketiga, Pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan dan perlindungan serta pengembangan usaha seluas-luasnya.

Sedangkan pengertian usaha Mikro berdasarkan UU RI no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sbb :
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.
 - Memiliki hasil penjual tahunan paling banyak Rp300.000.000,-
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang memenuhi kriteria sbb :

- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan
- memiliki omzet tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d paling banyak Rp2.500.000.000,-

Jadi jelaslah bahwa usaha dengan kriteria tersebut diatas secara financial dikategorikan sebagai usaha mikro berdasarkan undang-undang no 20 tahun 2008. Usaha mikro ini akan dapat lebih mampu untuk berdaya jika ada upaya pemberdayaan seperti juga diatur dalam UU no 8 tahun 2008 tentang UMKM dalam Asas, Tujuan dan Prinsip Pemberdayaan UMKM sebagai berikut:

1. Asas pemberdayaan UMKM

- Kekeluargaan
- Demokrasi ekonomi
- Kebersamaan
- Efisiensi berkeadilan
- Berkelanjutan
- Berwawasan Lingkungan
- Kemandirian
- Keseimbangan kemajuan, dan
- Kesatuan ekonomi nasional

2. Tujuan Pemberdayaan UMKM

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan

3. Prinsip Pemberdayaan UMKM

- Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- Usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar
- Meningkatkan daya saing UMKM, dan
- Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

Jelaslah di sini bahwa pemerintah sangat memperhatikan usaha mikro dalam pemberdayaan mereka yang diduga akan memberikan pengaruh terhadap kemandirian usaha itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah juga mengatur bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Informasi Usaha

- d. Kemitraan
- e. Perizinan Usaha
- f. Kesempatan Berusaha
- g. Promosi Dagang dan
- h. Dukungan kelembagaan

Bahkan pemerintah dan pemerintah daerah mamfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. Produksi Pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Sumber Daya Manusia dan
- d. Desain dan Teknologi

Usaha Mikro sekalipun tidak akan pernah terlepas dari undur dana/pendanaan, oleh karena itu peran pemerintah dan pemerintah daerah sangat besar dalam upaya mempermudah masyarakat menikmati fasilitas dari pemerintah berupa modal usaha melalui Pembiayaan dan Penjaminan UMKM yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil melalui:

- BUMN dan BUMS dalam bentuk Pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya
- usaha besar Naasional dan Asing
- Bantuan luar negeri dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat

- Memberikan insentif dalam bentuk persyaratan perizinan, keringanan tarif dll.

4. UMKM diberi akses terhadap peluang pinjaman atau kredit dengan cara :

- Kemampuan menyusun Studi Kelayakan Usaha (SKU)
- Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman dan
- Meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis dan manajerial usaha
- Modal kerja dan investasi
- Mengembangkan lembaga penjamin kredit.

Untuk mempermudah dan mempercepat pemberdayaan usaha Mikro perlu melibatkan para pelaku usaha yang lebih besar untuk menjadi orang tua angkat melalui jalur Kemitraan yang juga sudah diatur dalam UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM. Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, baik kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah dan kemitraan UMKM dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi

5. Kemitraan dilaksanakan dengan pola :
 - a. Inti Plasma
 - b. Subkontrak
 - c. Waralaba
 - d. Perdagangan Umum
 - e. Distribusi dan keagenan, dan
 - f. Bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (Joint Venture) dan outsourcing.

Mengacu dari semua yang sudah diatur oleh pemerintah melalui UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM penelitian ini dapat dikatakan berkiblat pada apa yang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia jadi dapat dikatakan sebagai wujud dukungan masyarakat (peneliti) terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dalam Penelitian ini pemberdayaan akan sangat efektif melalui empat faktor utama yaitu Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan. Melalui keempat faktor tersebut diduga akan mewujudkan pemberdayaan usaha mikro sehingga diduga akan mampu menjadikan usaha mikro dapat lebih mandiri.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia atau Human Resources mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Sonny Sumarsono, 2003). Dalam menghadapi krisis ekonomi nasional seperti saat ini, teori yang berbasis sumber daya yang menekankan pada penguatan internal sangat relevan bila diterapkan dalam pemberdayaan usaha. Perhatian utama harus ditekankan pada penciptaan nilai tambah untuk meraih keunggulan kompetitif melalui pengembangan kapabilitas khusus (kewirausahaan), sehingga usaha mikro tidak lagi mengandalkan strategi kekuatan pasar melalui monopoli dan fasilitas pemerintah. Dalam strategi ini, usaha mikro harus mengarahkan pada keahlian khusus secara internal yang bisa menciptakan produk inti yang unggul untuk memperbesar pangsa produksi. Strategi tersebut lebih murah dan ampuh dalam mengembangkan usaha, karena pengusaha mikro dapat memanfaatkan sumber daya lokalnya. Pemberdayaan usaha merupakan salah satu strategi dalam

mengentaskan kemiskinan, sebab sebagian besar pelaku usaha dan tenaga kerja yang terlibat dalam usaha mikro adalah masyarakat miskin. Dengan potensi yang dimiliki serta didukung oleh tersedianya sumber daya lokal, usaha mikro cukup memberikan arti bagi perkembangan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.

Meskipun dalam praktiknya upaya pemberdayaan pada usaha mikro telah dilakukan, namun pada kenyataannya banyak masalah internal dan eksternal yang dihadapi belum dapat teratasi. Sebagai akibatnya keberadaan usaha mikro belum maksimal dalam memberikan kontribusinya pada perkembangan ekonomi daerah, baik dalam hal terserapnya tenaga kerja maupun sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran Pemerintah

Peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana produksi sangat diperlukan terutama untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Hill (1995) menyatakan bahwa kunci untuk membuat usaha kecil menjadi efisien dan dinamik adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa membuat pelaku usaha terus bergantung pada bantuan- bantuan khusus pemerintah. Iklim usaha yang kondusif meliputi tersedianya sarana transportasi dan komunikasi, fasilitas usaha yang menunjang,

persaingan yang jujur, peraturan persaingan yang fair dan peraturan-peraturan yang adil merupakan faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha kecil (Chew , 1996).

Mengenai pola pikir dan pandangan hidup atau paradigma, pada umumnya pelaku usaha memiliki paradigma tradisional dan cenderung menutup diri terhadap perubahan dan inovasi. Mereka sangat fanatik dengan produk yang dihasilkan sehingga merasa cepat puas diri dengan hasil yang dicapai, yang berakibat “lupa” mengantisipasi perubahan di sekitarnya. Keinginan pasar yang terus berkembang tidak merangsang pengusaha untuk memodifikasi produk yang mereka hasilkan, sebab menurut mereka belum tentu membawa keuntungan pada barang yang dihasilkan tersebut. Dengan adanya pola pikir seperti ini barang yang mereka produksi cenderung bersifat statis baik bentuk, rupa maupun manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, pada umumnya keterbatasan jiwa kewirausahaan pengusaha, seperti melihat peluang pasar, keberanian menanggung resiko, kurangnya motivasi dan etos kerja yang rendah tetap merupakan dilemma.

Karena itu perlu adanya campur tangan pemerintah dalam membangkitkan semangat wirausaha melalui banyaknya kemudahan dari berbagai peraturan ataupun birokrasi yang ada serta kemudahan pelaku usaha mikro menikmati fasilitas umum yang mampu menunjang berlangsungnya usaha. Besar harapan dari pelaku usaha untuk dapat menambah banyak pengetahuan

tentang lingkungan eksternal seperti lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan perlindungan keamanan dari pemerintah.

Satu hal penting berkaitan dengan peran pemerintah adalah terbukanya akses yang mudah bagi pelaku usaha untuk belajar dari pelaku usaha lain yang memiliki usaha setara atau lebih besar namun lebih baik dan sudah lebih sukses. Hal ini akan membuka luas cakrawala berfikir pelaku usaha dan akan memberikan semangat yang lebih besar lagi dalam berusaha yang pada akhirnya akan menularkan semua yang diperoleh pada lingkungan sekitarnya sehingga benar-benar dapat membantu pemerintah mengatasi pengangguran.

Di samping itu, sebagian besar pelaku usaha mikro masih rendah tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya. Akibatnya pelaku usaha kurang mampu mengelola keuangannya dengan baik, mereka pada umumnya tidak memisahkan antara dana untuk usaha dan dana untuk keperluan pribadi, sehingga usahanya tidak dapat berjalan lancar. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan keahlian masyarakat yang masih rendah.

Dengan demikian, untuk dapat berkembang maju tanpa perbaikan kualitas faktor sumberdaya manusia adalah hal yang mustahil dapat tercapai, sehubungan dengan itu pendidikan dan

keampilan menjadi sesuatu yang perlu (Jhingan, 2004). Pendidikan merupakan faktor penting untuk mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan serta motivasi untuk maju, maka merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengushaa kecil ini melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan.

Modal Usaha

Masalah keterbatasan modal, baik modal kerja maupun untuk investasi bagi pengembangan usaha mikro tetap merupakan hambatan. Keterbatasan modal, terutama disebabkan oleh tidak adanya akses langsung para pelaku usaha mikro terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) maupun non bank. Hal ini berarti bahwa sebagian besar atau seluruh dana yang diperlukan untuk investasi perluasan usaha atau peningkatan volume produksi dan investasi untuk penambahan modal kerja berasal dari sumber pendanaan informal (Yusi dan Zakaria, 2005).

Dengan keterbatasan modal yang dimiliki, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan produktivitas menjadi terhambat. Mutu produk yang kadang seadanya dengan jumlah yang dihasilkan terbatas mengakibatkan peluang pasar yang tadinya dapat mereka raih menjadi terlewatkan. Dukungan

modal berupa pembiayaan dan penjaminan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Modal memainkan peranan yang sangat dominan dalam pengembangan usaha (Longenecker, 1998).

Kemitraan

Pengertian kemitraan secara konseptual adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan (Soemardjo, 2004). Saling memerlukan berarti bahwa pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi dan bimbingan. Saling memperkuat berarti pelaku usaha bersama-sama melaksanakan etika bisnis sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan saling membutuhkan sehingga memperkuat kesinambungan dalam bermitra (Martodireso dan Widada, 2002). Saling memerlukan berarti bahwa pelaku usaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi. Saling menguntungkan berarti pelaku usaha memperoleh peningkatan pendapatan disamping adanya

kesinambungan dalam usaha. Sedangkan maksud dan tujuan pola kemitraan (kusnaedi, 1984) adalah sebagai berikut:

1. Mengatur kerjasama yang seimbang dan saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
2. Memberikan iklim usaha yang lebih baik pada pelaku usaha mikro
3. Mendorong terciptanya pemerataan besudaha dan peningkatan pendapatan semua pihak.

Dengan semakin besarnya kesadaran dari beberapa negara bahwa kenyataan menunjukkan adanya kontribusi besar yang dapat disumbangkan oleh industri kecil dan mikro pada lapangan kerja dan penghasilan (chapra, 2000). Bahkan dari negara-negara maju seperti italia, Jerman dan Jepang malah lebih dulu menyadari potensi usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan lapangan kerja serta memperkenalkan tindakan-tindakan untuk menggalakkan industri mikro dan kecil dengan konsep kemitraan dengan industri menengah dan besar (Perry, 1999). Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk kemitraan yang bertujuan agar para pelaku usaha mikro tidak terpinggirkan, tetapi dapat diberdayakan sebagai salah satu pilar pembangunan diberbagai daerah. Kemitraan tersebut dibangun dalam satu kondisi pasar yang sehat. Sebenarnya, pada masa lalu, telah banyak dibuat berbagai macam program

kemitraan untuk mengembangkan usaha mikro guna mengentaskan kemiskinan. Namun sebagian besar program kemitraan itu tidak berumur panjang, yang bergema hanya pada saat pencanangan program dan kemudian menghilang begitu saja seiring berjalannya waktu. Walaupun demikian, ada beberapa program kemitraan yang berumur cukup panjang dan dapat menjadi pelajaran dalam membuat program-program kemitraan sebagai upaya memberdayakan dan memperkuat usaha mikro dalam pembangunan sosial ekonomi di berbagai daerah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak permasalahan mendasar yang mempengaruhi pengembangan dan pembangunan usaha mikro. Faktor ini kadangkala menjadi penghambat kemandirian usaha mikro yang bersangkutan dalam peningkatan omset penjualan, peningkatan asset usaha serta kepastian pasar yang berkesinambungan (Depperindag), 2004). Dan menjadi alasan logis bagi pengusaha besar untuk tidak melakukan kemitraan dengan pengushaa mikro. Padahal melalui kemitraan diharapkan dapat memberikan peluang meningkatkan peran usaha mikro untuk memperoleh keunggulan komparatif dan kompetitif (Hafsah, 2000).

Dari permasalahan yang ada dan pentingnya keberadaan usaha mikro dalam peta perekonomian daerah, maka sudah seharusnya perhatian diarahkan pada upaya pemberdayaan usaha dalam rangka memperkuat lingkungan internal usaha mikro ini. Dalam

berbagai konsep strategi bersaing dikemukakan bahwa keberhasilan suatu usaha sangat tergantung pada kemampuan atau lingkungan internal (Haar, 1995; Moini, 1995; Hine dan Kelly, 1997). Secara internal perusahaan perlu memiliki kompetensi inti (D'Aveni, 1998) atau kemampuan kewirausahaan yaitu kreativitas dan inovasi (Zimmerer, 1999).

D'Aveni (1998) dan Hamel (1998) berpendapat bahwa perusahaan harus menekankan strategi yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi inti, pengetahuan dan keunikan inovasi yang berbasis pada sumber daya internal untuk menciptakan keunggulan bersaing. Lebih lanjut, pandangan Porter (1997) tentang teori strategi bersaing, dirancang untuk menghadapi tantangan eksternal, khususnya persaingan. Dalam teori persaingan Porter, dikemukakan bahwa untuk menciptakan daya saing, perusahaan harus menciptakan keunggulan melalui strategi generic, yaitu strategi menekankan pada keunggulan biaya rendah, differensiasi dan fokus. Dengan strategi ini, perusahaan akan memiliki daya tahan hidup secara berkesinambungan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Pemberdayaan Usaha Mikro

Pelaku usaha mikro sudah saatnya dijadikan subyek dalam pembangunan sosial ekonomi bukan sekedar obyek. Selama ini

peran pengusaha kecil dalam sistem ekonomi nasional belum begitu kelihatan. Perlu upaya yang berkesinambungan untuk mengefektifkan serta mempercepat peningkatan kualitas hidup para pelaku usaha mikro dalam kerangka restrukturisasi dan revitalisasi ekonomi nasional dengan melakukan serangkaian perubahan yang bersifat struktural. Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar dari ketergantungan ke kemandirian. Perubahan struktural ini mensyaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemberdayaan (Sumodiningrat, 1999).

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari Negara berkembang memandang penting pemberdayaan usaha kecil dan menengah (Berry, 2001). *Pertama*, karena kinerja usaha kecil dan menengah cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja produktif. *Kedua*, sebagai bagian dari dinamika, usaha kecil dan menengah sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan teknologi. *Ketiga*, karena sering diyakini bahwa usaha kecil dan menengah memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar. Tentu saja usaha mikro tidaklah jauh dari itu juga.

Perlunya pemberdayaan usaha mikro tersebut dikarenakan usaha mikro di Indonesia sangat berbeda dengan usaha mikro di negara maju. Usaha kecil di Indonesia umumnya masih sangat terbatas dalam banyak segi misalnya sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, menggunakan teknologi tradisional yang umumnya direkayasa sendiri dan akses ke informasi mengenai pasar dan teknologi sangat minim. Sedangkan di negara-negara maju menunjukkan bahwa usaha mikro adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan wirausaha yang kreatif dan inovatif, penciptaan tenaga kerja trampil dan fleksibilitas proses produksi untuk menghadapi perubahan permintaan pasar yang cepat (Sengenberger, 1995; Schmitz, 1995).

Pemberdayaan usaha kecil sebagai ekonomi rakyat tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan strategi pertumbuhan. Kebijakan yang hanya mengandalkan pertumbuhan terbukti justru memperlebar jurang kesenjangan. Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural (*structural adjustment* atau *structural transformation*), dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

Di negara maju seperti Amerika dukungan terhadap pembangunan usaha kecil pun dilakukan. Komitmen pemerintah AS dalam mengembangkan sektor usaha kecil terlihat dalam pemberitahuan Small Business Administration (SBA) oleh pemerintah federal

pada tahun 1953. Hasil penelitian dari Hu dan Schive (1996) di Taiwan telah menunjang kenyataan di atas. Peranan pemerintah yang sangat pro aktif dengan kebijakan-kebijakan industrinya yang sangat berorientasi global dan konsisten, yang menciptakan baik kerja sama bisnis yang erat maupun kompetisi yang jujur antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar serta penyediaan berbagai fasilitas untuk menunjang perkembangan sektor usaha kecil telah menyebabkan usaha kecil dan menengah berkembang maju.

India dapat dikatakan sebagai negara pertama di Asia yang memberikan perhatian besar terhadap pembangunan usaha mikro, khususnya di pedesaan yang disebut Khadi & Village Industries. Setelah merdeka pada tahun 1948, pemerintah India mengeluarkan *the indystrial policy resolution* sebagai dasar kebijakan pembangunan dan pertumbuhan industri nasionalnya, termasuk skala kecil (Bhargava, 1996).

Dalam menghadapi era perdagangan bebas, diperlukan suatu strategi baru dalam pembangunan industri kecil yang lebih efektif dan berorientasi pasar global (*global market oriented*), bukan lagi orientasi politis dan sosial (*social and political oriented*) dengan tujuan semata-mata untuk mengurangi kesenjangan. Strategi baru ini harus mengandung kebijakan-kebijakan pengembangan usaha kecil yang bisa menempatkan posisi kelompok usaha. Hal ini sebagai salah satu tulang punggung dunia usaha nasional pada

umumnya. Strategi ini dimulai dari upaya penguatan lingkungan internal usaha kecil yang bersangkutan.

Kemandirian Usaha

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2012), jumlah usaha kecil dan menengah termasuk usaha mikro - selanjutnya baca UKM - mencapai angka 56,5 juta unit atau 99,99% dari total usaha yang ada dan mampu menyerap lebih dari 107,6 juta tenaga kerja atau 97,2% dari total angkatan kerja yang ada. Disamping itu, UKM juga telah memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu sekitar 57,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) diluar minyak dan gas. Namun demikian, peranan UKM dalam ekspor masih relatif rendah, yaitu dibawah 20%.

Selanjutnya, kalau data UKM tersebut dipilah lebih rinci lagi, bahwa dari 56,5 juta unit tersebut, 55,8 juta atau 98,79% adalah usaha mikro, 629.418 unit atau 1,11% usaha kecil dan 48.997 unit atau 0,09% usaha menengah. Usaha besar sebanyak 4.968 unit atau 0,01% saja dari total usaha nasional. Bahkan, jika ditinjau dari tingkat pendidikannya, bahwa sebagian terbesar (lebih dari 97%) pengelola usaha mikro dan kecil berpendidikan SLP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para pengusaha mikro dan kecil sangat rendah sekali.

Untuk memberikan gambaran, jumlah Koperasi di Indonesia saat ini sudah ada sebanyak 200.808 unit dengan anggota sebanyak 34,6 juta orang lebih. Total volume usaha koperasi telah mencapai Rp.119,2 trilyun dengan SHU sebesar Rp.6,6 trilyun. Salah satu dari koperasi yang ada, yakni Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG) sudah masuk kelas Koperasi Dunia yang diterbitkan oleh ICA tahun ini.

Rendahnya tingkat pendidikan para pengusaha kita, khususnya UKM membawa dampak pada berbagai masalah yang dihadapi oleh UKM. Masalah-masalah tersebut adalah: (a) kekurangmampuan akses dan perluasan pangsa pasar; (b) kekurangmampuan akses pada sumber-sumber pendanaan, khususnya bank; (c) keterbatasan akses pada informasi; (d) kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan alih teknologi; dan (e) kelemahan dalam pengelolaan organisasi dan manajemen.

Secara umum, jika dicermati, UKM itu cenderung mengembangkan bisnisnya "*one man show*". Karena pengelolaan bisnisnya dilakukan sendiri, sehingga tingkat produktivitas usahanya sangat rendah. Bahkan tidak jarang UKM kurang memperhatikan kualitas dan disain produknya.

Permasalahan tersebut diatas, tentunya akan mempengaruhi daya saing UKM di masa depan. Terlebih lagi dalam era globalisasi yang kita hadapi ke depan, yang tidak mengenal lagi batas-batas

antar negara dan dengan didukung oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat akan menyebabkan aliran barang ibarat air mengalir dari hulu ke lembah, begitulah akan terjadi aliran barang dan jasa dari negara lain ke negara kita. Oleh karena itulah, Koperasi dan UKM (KUKM) harus ditingkatkan kemampuannya agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.

Demikian juga dalam era otonomisasi. Dalam era otonomisasi ini peran pemerintah pusat tidak seperti pada era sebelumnya yang sentralistis. Masing-masing daerah bebas mengembangkan kreasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pada era otonomisasi ini pula masing-masing KUKM akan memperoleh perlakuan yang berbeda sesuai dengan kapasitas daerah dimana KUKM itu berada.

Pada daerah yang mampu dari segi pendanaan kalau ditunjang oleh konsep yang jelas dalam pemberdayaan KUKM akan mampu menghasilkan KUKM yang tangguh sesuai dengan potensi daerah bersangkutan. Sebaliknya, pada daerah yang miskin akan terjadi keterbatasan dalam upaya pemberdayaan KUKM di daerah bersangkutan. Kalau hal ini terus kita biarkan, tanpa adanya motivasi yang tinggi dari masing-masing pelaku usaha untuk maju, maka mereka akan selalu kalah bersaing dengan pelaku usaha yang lain, di dalam dan luar negeri.

Disamping menghadapi tantangan tersebut, daya saing Indonesia sendiri juga masih ketinggalan dari Negara lain, termasuk di ASEAN. Pada tahun 2013 posisi daya saing Indonesia sudah semakin baik, yakni menduduki urutan ke 38 dari 149 negara yang disurvei. Posisi Indonesia masih berada pada urutan ke-5 di ASEAN, setelah Singapura (ke-2), Malaysia (ke-24), Brunei Darussalam (ke-26), dan Thailand (ke-37).

Dibalik tantangan tersebut sebenarnya ada potensi peluang yang sangat besar. Namun demikian, hal ini sangat tergantung pada bagaimana kita mampu menggali dari potensi yang ada tersebut.

Beberapa peluang yang ada diantara tantangan tersebut adalah adanya blok atau kawasan/wilayah perdagangan dan investasi yang bebas. Di kawasan ASEAN kita akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 nanti. Di kawasan Asia dan Pasifik ada APEC, yang bagi anggota ekonomi sedang berkembang seperti Indonesia akan kita masuki pada tahun 2020. Kawasan perdagangan dan investasi regional ini dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi bisnis.

Kemandirian usaha, termasuk para pelaku UKM, sudah merupakan suatu keharusan terlebih menghadapi tantangan global saat ini dan nanti. Menghadapi persaingan yang ketat, pelaku usaha harus mampu menentukan strategi yang jitu dalam memenangkan persaingan. Para pelaku usaha harus bisa berhadaptasi dengan kecenderungan yang terjadi, yakni:

1. Karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, dan bentuk organisasi yang cenderung membentuk jejaring (network);
2. Tingkat industri yang pengorganisasian produksinya fleksibel dengan pertumbuhan yang didorong oleh inovasi/pengetahuan; didukung teknologi digital; sumber kompetisi pada inovasi, kualitas, waktu, dan biaya; mengutamakan research and development; serta mengembangkan aliansi dan kolaborasi dengan bisnis lainnya.

Disamping itu, posisi tenaga kerja juga cenderung dengan kebijakan upah dan pendapatan yang tinggi, keterampilan yang luas dengan berbagai disiplin, pembelajaran tanpa kenal waktu, dan dengan pengelolaan buruh yang kolaboratif.

Oleh karena itulah, untuk dapat memenangkan persaingan dalam menembus pangsa pasar global, karakteristik pasar, industri, dan karyawan atau buruh tersebut patut diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis, tidak terkecuali bagi KUKM.

Mengurangi kesenjangan ekonomi maju dan yang sedang berkembang, maka dibutuhkan antara 50 sampai dengan 70 juta orang pengusaha baru di kawasan APEC. Diantaranya 20 juta orang harus ditumbuhkan di Indonesia sampai tahun 2020. Oleh karena itu peranan pelatihan kewirausahaan sangat penting

artinya guna dapat menghasilkan pengusaha-pengusaha baru yang memiliki daya saing tinggi ke depan.

Perlu adanya strategi pengembangan usaha, khususnya KUKM, agar mampu mandiri dan membangun kolaborasi atau jejaring ke depan, ada beberapa hal yang harus kita benahi. Hal ini sudah diatur juga dalam payung hukum, yakni UU No.20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan UU No.17/2012 tentang Perkoperasian.

Kedua perangkat peraturan perundangan ini sangat jelas mengamanatkan, bahwa strategi pengembangan KUKM harus dilakukan dengan pola FOKUS dan PRIORITAS, agar sumber daya yang terbatas dapat menghasilkan secara optimal. Pendekatannya pun sangat jelas harus dipisahkan antara usaha mikro dengan usaha kecil dan menengah. Untuk usaha mikro pendekatan pembinaannya adalah welfare approach yang bobotnya lebih pada pendekatan sosial. Sedangkan usaha kecil dan menengah diberdayakan dengan business approach.

Menyadari akan keterbatasan sumberdaya yang ada, maka ada beberapa sasaran fokus yang dapat dilakukan untuk membangun kemandirian usaha:

1. Fokus dalam sektor. - Kalau kita lihat sektor-sektor dominan dalam UKM maka kita perlu bedakan antara sektor pertanian dan non-pertanian. Sektor pertanian

mebutuhkan penanganan tertentu yang berbeda dengan sektor non-pertanian.

2. Perlu dipilih kelompok KUKM yang kiranya dapat menjadi penghela bagi yang lain. Fokuskan pada UKMK kecil/menengah yang mempunyai potensi ekspor.
3. Dari fokus ini maka pembinaan diarahkan kepada pembinaan kompetensi - melalui mekanisme ekspor.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, ada beberapa model ekonomi rakyat, baik yang sudah ada maupun belum yang dapat dikembangkan, antara lain:

1. Industri di desa, yaitu industri yang mengambil lokasi di desa untuk mengatasi masalah urbanisasi, antara lain industri sepatu, garment, dan cangkul
2. Industri pedesaan, yaitu industri yang mengolah produk-produk pedesaan antara lain singkong untuk gablek; kayu sengon untuk vineer, papan laminasi, dan kusen pintu; industri kopi; teh dan lainnya,
3. Integrated atau mixed farming, yaitu pertanian terpadu yang antara lain meliputi ternak ayam, kambing/domba dan sapi, kolam ikan dikombinasikan dengan tanaman padi, jagung, dan sayur mayur lainnya untuk menghasilkan

organic farming, pola PIR, seperti model kelapa sawit, tebu, dan lainnya,

4. Cluster industry, seperti untuk perak di Kota Gede di Yogyakarta; Celuk di Gianyar, Bali; sepatu di Cibaduyut dan Sidoharjo, dan lainnya,
5. Inkubator bisnis dan teknologi yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan pengusaha-pengusaha yang tangguh.

Sasaran ini menjadi penting karena pada masa ini dan khususnya memasuki MEA 2015 dan APEC maka orientasi keterbukaan dan mekanisme pasar bersama-sama akan menempatkan kemampuan menghasilkan unggulan menjadi kompetitif, menjadi dasar keberhasilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka semua upaya pengembangan perlu difokuskan kepada kompetensi - bagaimana kita menumbuhkan kemampuan dan sikap yang perlu ditumbuhkan untuk keberhasilan. Mengingat data statistik di atas, maka perlu untuk memfokuskan upaya kepada kelompok kecil/menengah yang sudah dalam lingkungan ini agar dapat memperkuat kemampuan mereka. Mengeluarkan kelompok usaha rakyat di lingkungan pertanian dan mengkhususkan dalam usaha non-pertanian sebagai sasaran pembinaan yang dengan sadar dipilih.

Tidak berarti usaha kecil kebawah tidak penting - usaha kecil dan mikro seperti juga usaha pertanian perlu ditangani secara khusus. Dalam pemberdayaan mereka memerlukan mesin pengembangan yang harus ada dalam dunia usaha itu sendiri. Kita memerlukan suatu fokus - yang kemudian dapat menjadi penghela dari sektor yang lain - yang sebagian besar masuk lingkungan mikro yang usahanya seringkali seadanya - tidak dapat berinisiatif untuk menetapkan strategi apa yang hendak dikembangkan untuk mencapai hasil yang dicitakan.

Pendekatan pengembangan yang perlu diambil tentu lebih bersifat komprehensif dimana berbagai pengembangan melalui pelatihan dipadukan dengan pengembangan yang bersifat pengalaman (experiential approach) dan lingkungan serta infra struktur yang mendukung.

Bagian yang penting dari Kompetensi Perdagangan Luar Negeri ini adalah kemampuan pengusaha untuk mengembangkan jaringan usaha (networking) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ringkasan dan Kerangka Pikir Penelitian

Ringkasan

Kota Yogyakarta sebagai kota wisata, kota budaya dan kota pendidikan menampung banyak pendatang dengan berbagai

alasan yang berbeda-beda ketika datang ke Yogyakarta. Salah satunya bertujuan untuk berdagang dan diantara para pedagang ada pedagang kecil yang berusaha pada usaha mikro. Para penjaja usaha mikro ini datang dari luar kota Yogyakarta masih dalam wilayah DIY maupun luar DIY. Predikat DIY sebagai wilayah yang memiliki masyarakat miskin terbesar se Jawa berimbas pada Kabupaten Kota Yogyakarta itu sendiri dimana Kota Yogyakarta menjadi sasaran tempat mencari nafkah yang potensial ibaratnya berdagang apa saja pasti laku, termasuk usaha jajanan. Sangat beralasan karena pelajar dan mahasiswa yang ada di kota Yogyakarta sangat banyak. Tahun 2013 tercatat sekitar 310.860 mahasiswa dari 33 provinsi di Indonesia belajar di Yogyakarta. Dari jumlah itu, 244.739 orang atau 78,7 persen adalah mahasiswa perantauan dari luar daerah.. Dari sisi wisata Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua di Indonesia setelah Bali. Adapun jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2009 di Kota Yogyakarta berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DIY adalah 2.348.152 orang. Jumlah kunjungan tersebut terbagi atas 1.850.675 (88,84%) wisatawan domestik dan 261.973 (11,16%) wisatawan mancanegara. Baik pelajar maupun wisatawan sangat potensial menjadi pasar untuk jajanan di Kota Yogyakarta

Usaha Mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara

Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-. Ciri-ciri usaha mikro: Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti; Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat; Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha; Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai; Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah; Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank; Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Seperti halnya usaha kecil atau UKM (Usaha Kecil Menengah) peran Usaha mikro di Indonesia cukup membantu bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu pemberdayaan usaha mikro sangat penting untuk terus dikembangkan sehingga dengan demikian dapat menjadi topik penelitian yang cukup menarik untuk di dikembangkan. Pemberdayaan usaha mikro merupakan salah satu strategi pengentasan kemiskinan. Dengan potensi yang ada dan didukung oleh tersedianya sumber daya lokal, usaha mikro cukup memberikan arti bagi perkembangan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Masalah utama yang dihadapi dalam pengembangan dan

penguatan usaha mikro adalah paradigma yang dianut oleh para pengusaha mikro yang cenderung bersifat konvensional, merasa puas dengan hasil yang dicapai. Hal ini akan berdampak pada lambatnya respon terhadap perubahan yang terjadi. Masalah penting lainnya yang harus dipecahkan dalam pengembangan usaha mikro adalah masalah kualitas sumberdaya manusia, dan masalah keterbatasan modal.

Melihat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha mikro, strategi pemberdayaan usaha mikro yang komprehensif dan berkesinambungan dengan cara menumbuhkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, memaksimalkan Peran Pemerintah, mendayagunakan Modal Usaha dan memperkuat jalinan Kemitraan perlu dilakukan secara simultan agar dihasilkan keunggulan bersaing sehingga mampu memberdayakan usaha mikro yang pada akhirnya dapat memandirikan usaha mikro itu sendiri. Kemandirian usaha mikro mempunyai sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Besar harapannya agar usaha mikro dapat berkembang menjadi usaha kecil bahkan usaha menengah, Namun tetap menjadi usaha yang bertanggung jawab baik terhadap diri sendiri (usaha mikro itu sendiri) maupun orang lain (konsumen). Sehingga diharapkan pengembangan usaha mikro di kota Yogyakarta pada akhirnya akan menyentuh hingga masalah moralitas pelaku usaha (pelaku bisnis Etis)

Kerangka Pikir Penelitian

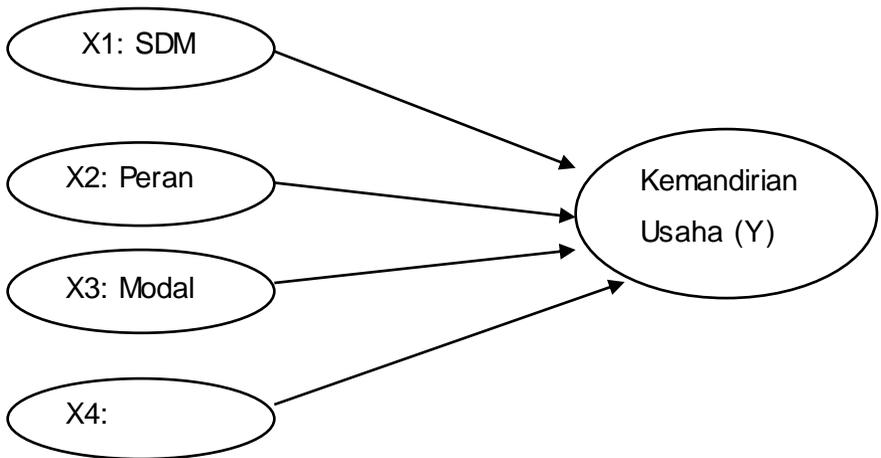
Landasan utama penelitian ini adalah Undang-undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM dimana usaha Mikro diatur oleh pemerintah. Dalam undang-undang tersebut sangat jelas bahwa pemberdayaan menjadi salah satu unsur dan tujuan pemerintah bagi UMKM. Dalam hal ini peneliti berfikir bahwa ada faktor-faktor yang jika dimaksimalkan perannya akan sangat efektif mencapai upaya pemberdayaan hingga mencapai pada apa yang dinamakan kemandirian usaha. Rasa ingin ikut berbuat kepada masyarakat kota Yogyakarta dimana keprihatinan para pelaku usaha mikro yang terkadang mengabaikan masalah-masalah etika dalam berbisnis atas dasar yang penting dapat keuntungan sehingga sebenarnya merugikan konsumen yg notabnya pelajar dan mahasiswa adalah konsumen yg cukup besar jumlahnya. Semua itu dilakukan karena mereka belum memiliki Kemandirian Usaha.

Ada empat faktor pemberdayaan yang menurut peneliti mampu memaksimalkan peran usaha mikro dalam rangka menuju Kemandirian Usaha yaitu Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Peran Pemerintah, Pemberdayaan Modal Usaha, dan Pemberdayaan Kemitraan. Jika Pemberdayaan Sumber Daya Manusia usaha Mikro ditingkatkan kualitasnya maka diduga akan mampu mempengaruhi Kemandirian lebih baik karena mereka mampu melakukan manajemen usaha yang lebih baik, mampu

mengambil keputusan dengan lebih tepat dan sebagainya dan yang lebih baik lagi adalah mampu dan mau bertanggung jawab atas usaha yang dilakukannya secara moralitas dan kesehatan produk jajarannya sehingga dapat tercipta produk jajanan sehat demi kesejahteraan bersama. Sedangkan Pemberdayaan Peran Pemerintah jelas menjadi faktor yang akan sangat mendorong Keandirian Usaha mikro karena dengan perhatian yang lebih tepat dan baik dari pemerintah Kota Yogyakarta khususnya maka diduga akan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pengusaha mikro karena merasa dilindungi, dididik dan diberi kemudahan serta fasilitas dari pemerintah Kota Yogyakarta. Faktor berikutnya adalah pemberdayaan Modal Usaha dimana peran modal menjadi sangat krusial manakala modal ini mudah didapatkan dengan jaminan dari pemerintah maka para pelaku usaha mikro akan sangat yakin dalam menjalankan usahanya, karena harapan mereka beban pembayaran pinjaman tidak akan memberatkan. Faktor terakhir adalah Pemberdayaan Kemitraan dengan usaha yang berskala lebih di atasnya akan mampu memberikan dampak positif karena para pelaku usaha mikro dapat belajar lebih banyak dari berbagai sisi pembelajaran usaha, sedangkan dengan mitra selevel dapat saling memberi dukungan usaha dan bahkan saling mengontrol dan mengingatkan agar tercipta persaingan yang sehat.

Berikut gambar model penelitian yang akan menjadi acuan kerangka pikir bagi peneliti:

Gambar 2 Model Penelitian



Variabel-variabel yang akan terkait dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Y : Kemandirian Usaha
- X1 : Sumber Daya Manusia
- X2 : Peran Pemerintah
- X3 : Modal Usaha
- X4 : Kemitraan

Hipotesis

Hipotesis 1: Variabel Sumber Daya Manusia mempengaruhi Kemandirian Usaha Mikro

Sumber Daya Manusia menjadi variable penting karena usaha Mikro sangat tergantung kepada faktor manusia yang menjalankan dan sangat belum bergantung kepada mesin sehingga kualitas Sumber Daya Manusia menjadi penentu bagi berdayannya sebuah usaha mikro baik itu pemilik usaha maupun karyawan usaha yang ikut ambil bagian dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Variabel Sumber Daya Manusia diduga akan memberikan pengaruh terhadap kemandirian melalui upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan misalnya dengan melakukan training manajemen, training akuntansi, training motivasi, dan training-training yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan

Hipotesis 2: Variabel Peran Pemerintah mempengaruhi Kemandirian usaha Mikro

Pemerintah pusat dan daerah memberikan peran yang sangat kuat terhadap kemampuan usaha mikro untuk terus berdaya karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha mikro akan berdampak langsung kepada upaya pemberdayaan misalnya dengan mengeluarkan undang-undang

yang memberikan perlindungan bagi usaha mikro, memberikan sarana dan prasarana seperti tempat usaha, peralatan, mesin yang mudah didapat, membantu menghubungkan dengan pihak-pihak yang concern terhadap pelaku usaha mikro, membuka kesempatan yang luas bagi peningkatan SDM seperti memberikan pelatihan gratis bagi pelaku usaha mikro.

Hipotesis 3: Variabel Modal Usaha mempengaruhi Kemandirian Usaha Mikro

Selama ini modal usaha menjadi momok bagi usaha mikro karena mereka merasa sulit mendapatkan pinjaman modal walaupun ada bunganya sangat tinggi sehingga pelaku usaha tidak mampu melakukan pembayaran atau cicilannya, bahkan seringkali diminta berbagai persyaratan seperti agunan yang memberatkan. Modal Usaha yang lebih mudah didapatkan karena syarat pencairannya yang mudah dan bunga yang ringan menjadi dambaan para pelaku usaha. Dengan demikian mereka akan lebih mudah dalam menjalankan usahanya hal ini akan mampu memberdayakan usaha mikro misalnya dengan cara meningkatkan peran perbankan baik bank nasional maupun daerah untuk lebih memperhatikan usaha mikro, meningkatkan peran koperasi sebagai soko guru bagi berkembangnya usaha mikro yang pada akhirnya modal usaha ini mampu memandirikan usaha mikro.

Hipotesis 4: Variabel Kemitraan mempengaruhi Kemandirian Usaha Mikro

Di Indonesia tidaklah sedikit para pelaku usaha dengan skala diatas usaha mikro dimana mereka memiliki pengalaman dan kekuatan dalam banyak faktor dapat membantu mengentaskan usaha mikro menjadi lebih berdaya dan akhirnya mampu mandiri. Keterlibatan peran para mitra selevel atau yang lebih diatasnya akan sangat menggairahkan potensi keberdayaan usaha mikro dan sudah barang tentu pengaruhnya bias sampai kepada geliat ekonomi nasional yang mampu memperkuat kemakmuran Negara.

Hipotesis 5: Variabel Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan saling mempengaruhi dan secara bersama-sama memberikan pengaruh kepada Kemandirian Usaha Mikro

Antar variabel memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi hal ini tentu saja akan berdampak pada Kemandirian Usaha. Pemberdayaan melalui peningkatan SDM misalnya juga harus mendapatkan dukungan dari peran Pemerintah, membutuhkan modal usaha dan terkait dengan kemitraan pastinya. Pemerintah

Kota Yogyakarta akan memberikan banyak peran jika pelaku usaha itu sendiri bersifat aktif dalam variabel-variabel terkait.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pemilihan Subyek

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro di beberapa lokasi yang ada di wilayah kota Yogyakarta yang menjual produk jajanan. Lokasi yang dipilih berdasarkan wilayah/daerah dengan penduduk setempat yang warganya sebagian besar bermata pencaharian sebagai pelaku usaha mikro sebagai penjual jajanan seperti bakso dan mie ayam, angkringan, tempura, aneka es, warung makan, jajanan pasar, siamay, batagor dll, baik yang dijual secara berkeliling maupun mangkal di lokasi tertentu. Tidak terlepas bagi mereka yang berjualan di depan sekolah-sekolah serta tempat-tempat wisata.

b. Sampel

Dari populasi yang ada tersebut maka dalam penelitian ini akan diambil sampel dengan didasarkan cluster sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kelompok. Yaitu kelompok pelaku usaha mikro yang menjual jajanan pada beberapa lokasi yang ada di kota Yogyakarta, khususnya wilayah Wirobrajan, Kauman dan Pakuncen. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 kelompok pelaku usaha dan masing-masing

kelompok terdiri dari 20 penjual jajanan, jadi jumlah sampel yang diambil adalah 200 responden pengujian keseluruhan hipotesis.

Kelompok tersebut adalah:

1. Bakso dan Mie Ayam
2. Batagor, Cilok dan Cireng
3. Tempura
4. Es Kelapa Muda, es campur dan Jus
5. Warung makan/ lesehan
6. Angkringan
7. Jajan Pasar
8. Pecel Lele dan Ayam bakar
9. Siomay
10. Sate

Sumber, Pengumpulan dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari para pelaku usaha mikro yang menjual jajanan melalui kuisisioner yang diberikan kepada mereka serta teknik wawancara langsung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada responden pelaku usaha mikro yang menjual jajanan. Untuk meningkatkan *response rate*, kuisisioner yang disampaikan pada responden disertai surat permohonan kesediaan sebagai responden. Kuisisioner juga dilengkapi dengan petunjuk pengisian yang sederhana dan informatif untuk memberikan kemudahan

bagi responden dalam mengisi kuisioner. Peneliti memberikan penjelasan secara langsung kepada responden mengenai cara pengisian kuisioner tersebut. Sedangkan jenis data adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau data yang dapat dihitung seperti dalam hal ini adalah hasil olehan data statistik yang berasal dari kuisioner yang terkumpul dari responden. Perhitungan hasil kuisioner tersebut akan menjadi data yang dapat memberikan gambaran hasil penelitian. Data Kualitatif adalah merupakan serangkaian informasi yang masih maerupakan fakta-fakta verbal atau berupa keterangan-keterangan saja dan merupakan data yang tidak dapat dihitung karena bukan dalam bentuk angka merupakan analisa yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini dapat dikaitkannya perkembangan pengguna internet banking berdasarkan sejarah perbankan yang ada di Indonesia.

Desain dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi dengan bantuan software SPSS. Dengan alat analisis ini diharapkan diperoleh estimator yang baik. Terdapat 6 variabel laten dalam penelitian ini, yaitu Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, Kemitraan, Pemberdayaan dan Kemandirian Usaha.

1. Analisis Regresi Berganda

Untuk menganalisis hipotesis pengaruh masing-masing faktor Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, Kemitraan, karena adanya Pemberdayaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro jajan baik secara serentak maupun parsial digunakan analisis Model regresi Linier Berganda. Menurut Gujarati (1997 : 28) model regresi untuk menganalisis data memakai rumus sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Dalam penelitian ini variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) ditentukan sebagai berikut :

Y_i = Kemandirian Usaha

X_1 = Sumber Daya Manusia

X_2 = Peran Pemerintah

X_3 = Modal Usaha

X_4 = Kemitraan

B_0 = Intersep. Konstanta yang merupakan rata-rata nilai Y_i pada saat X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 sama dengan nol

B_1 = Koefisien regresi parsial, mengukur nilai rata-rata Y_i untuk tiap unit perubahan dalam X_1 dengan menganggap X_2 , X_3 dan X_4 konstan

B_2 = Koefisien regresi parsial, mengukur nilai rata-rata Y_i untuk tiap unit perubahan dalam X_2 dengan menganggap X_1 , X_3 dan X_4 konstan

B_3 = Koefisien regresi parsial, mengukur nilai rata-rata Y_i untuk tiap unit perubahan dalam X_3 dengan menganggap X_1 , X_2 dan X_4 konstan

B_4 = Koefisien regresi parsial, mengukur nilai rata-rata Y_i untuk tiap unit perubahan dalam X_4 dengan menganggap X_1 , X_2 dan X_3 konstan

2. Uji Hipotesis

a. Uji Validitas dan Realibilitas

Instrumen penelitian yang selesai disusun harus di yakinkan bahwa instrument tersebut harus benar-benar dapat mengukur senyatanya (actually) dan akuratnya (accurately) terhadap konsep yang diukur. Pengukuran konsep senyatanya berhubungan dengan validitas dan pengukuran seakuratnya berhubungan dengan realibilitas. Instrumen yang valid artinya instrument yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reabel artinya instrument yang bila digunakan untuk mengukur obyek yang sama meskipun waktu dan tempatnya berbeda akan memperoleh hasil yang sama

b. Uji F

Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Jika model signifikan maka model bisa digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya jika non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan untuk peramalan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (H_0 di tolak H_a diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS, Gunakan Uji Regresi dengan Metode Enter/Full Model).

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan (bersama-sama) koefisien regresi variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel tergantung. Menurut Gujarati (1997 : 120) formula untuk uji F adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2(k - 1)}{(1 - R^2)/(N - k)}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi

K = jumlah variabel

N = jumlah sampel

Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0 = b_1, b_2, b_3, b_4 \leq 0$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor (X_i) dengan variabel terikat (Y_i).

$H_a = b_1, b_2, b_3, b_4 > 0$ artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor (X_i) dengan variabel terikat (Y_i).

Pengujian melalui uji F ini dengan membandingkan F hitung dengan F tabel pada tingkat keyakinan yang digunakan sebesar 95%. Apabila F hitung $>$ F tabel H_0 ditolak dan H_a diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas/ prediktor secara serentak atau silmutan mampu memberikan penjelasan terhadap variasi pada variabel tergantung (signifikan), atau dengan kata lain bahwa model analisis yang digunakan adalah sesuai hipotesis.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan dari model analisis yang dibuat. Nilai koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti secara simultan terhadap variasi variabel tergantung. Bila R^2 mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas (X_i) terhadap variabel tergantung (Y_i) semakin besar. Hal ini berarti model yang

digunakan semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel tergantung. Menurut Gujarati (1997: 139) koefisien determinasi berganda digunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS}$$

$$R^2 = \frac{\beta_2 EY_i X_{2i} + \beta_3 EY_i X_{3i} + \dots + \beta_k EY_i X_{ki}}{EY^2}$$

Keterangan:

R² = Koefisien determinasi

ESS = jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = jumlah kuadrat residual

TSS = ESS + RSS

c. Uji t

Independent Sample t-Test atau Uji t sample independen digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Uji ini biasanya digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Gendro Wiyono, 2011)

Menurut Gujarati (1997: 74) dirumuskan sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_i - \beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Keterangan:

B_i = koefisien regresi

Se (β) = standar deviasi

Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

Ho = $b_1, b_2, b_3, b_4 = 0$ artinya tidak ada pengaruh yang nyata antara Xi dengan Yi

Ha = $b_1, b_2, b_3, b_4 \neq 0$ artinya ada pengaruh bermakna antara Xi dengan Yi dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, kemudian dibandingkan t hitung dengan t tabel.

Apabila nilai t hitung > t tabel $\alpha/2$ maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel prediktor (Xi) dengan variabel terikat (Yi). Apabila nilai t hitung < t tabel $\alpha/2$ maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing antara variabel prediktor (Xi) dengan variabel terikat (Yi).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Validasi Instrumen

Pada dasarnya, sebuah penelitian adalah melakukan pengukuran terhadap variabel. Variabel-variabel penelitian sebenarnya merupakan kumpulan konsep mengenai fenomena yang akan diteliti, dan hanya variabel yang menunjukkan indikator yang jelas dapat dilakukan pengukuran. Hal ini disebabkan data mengenai variabel yang bersangkutan akan diambil melalui suatu prosedur pengukuran, sedangkan pengukuran yang valid hanya dapat dilakukan terhadap atribut yang sudah didefinisikan secara jelas dan tegas (Gendro Wiyono, 2011). Dalam Penelitian ini menggunakan Instrumen atau Alat Ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan Kuisisioner, dari hasil didapatkan jawaban yang kemudian diberikan penilaian secara kualitatif lalu diolah menggunakan alat analisis berupa SPSS. Kuisisioner merupakan bentuk instrumen pengumpulan data yang sangat luwes dan mudah digunakan. Data yang diperoleh dari instrumen merupakan data yang dikategorikan sebagai data faktual.

Penelitian ini mengangkat judul Model Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Kemandirian Usaha (Survey pada Usaha Jajanan di Kota Yogyakarta) dengan variabel-variabel independent Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal

Usaha dan Kemitraan, dan variabel dependent Kemandirian Usaha. Dalam kuisisioner yang diserahkan responden (pelaku usaha jajanan) variabel-variabel tersebut (4 variabel) menjadi acuan pertanyaan dalam kuisisioner. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen/alat ukur yang digunakan dalam kuisisioner penelitian ini sangat dapat dipertanggungjawabkan kevalidtannya karena semua variabel tersebut menjadi perhatian penting dalam UU No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga dapat diteruskan ke dalam tahapan berikutnya yaitu pengolahan data penelitian dimana Alat Analisis yang digunakan adalah SPSS.

SPSS (Statistical Product and Service Solutions) adalah merupakan salah satu dari sekian banyak software statistika yang telah dikenal luas. SPSS dapat melakukan lebih cepat semua perhitungan statistik dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. Hasil dari jawaban kuisisioner yang diserahkan kepada peneliti yang berjumlah 30 ditambah 200 dengan 5 variabel independen/variabel bebas dan 1 variabel dependen/variabel terikat yaitu Variabel Kemandirian Usaha dapat diolah dengan hasil yang akurat dan menghasilkan output yang bisa menjadi suatu simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Pengumpulan dan Penyajian Data

Penelitian adalah melakukan pengukuran terhadap variabel dengan pemberian nilai properti dari suatu obyek. Karena dalam

penelitian ini nilai properti diberikan kepada variabel yang berhubungan dengan konsep yang abstrak maka teknik yang dapat digunakan untuk mengukurnya adalah memecah konsep menjadi beberapa karakteristik yang dapat diobservasi/pengoperasionalan konsep (*operationalizing the concept*). Skala pengukuran yang digunakan adalah Skala Ordinal yaitu menunjukkan posisi atau jenjang suatu angka untuk memberikan pilihan bagi responden tentang arah jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Dalam Kuisisioner penelitian ini digunakan Skala Ordinal dengan urutan sebagai berikut: Sangat Sangat Tidak Setuju (SSTS), Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS), dan Sangat Sangat Setuju (SSS). Untuk mendapatkan data kualitatif yang akurat maka perlu dilakukan. Teknik Penskalaan yang sesuai dari kuisisioner yang menggunakan Skala Ordinal tersebut digunakan Teknik Penskalaan dengan Skala Likert (Likert Scale) sebagai berikut:

- Nilai 1 untuk SSTS (Sangat Sangat Tidak Setuju)
- Nilai 2 untuk STS (Sangat Tidak Setuju)
- Nilai 3 untuk TS (Tidak Setuju)
- Nilai 4 untuk S (Setuju)
- Nilai 5 untuk SS (Sangat Setuju)
- Nilai 6 untuk SSS (Sangat Sangat Setuju)

Dengan menggunakan skala pengukuran tersebut maka kuisisioner (terlampir) dapat menghasilkan data yang dapat disajikan sebagai data akurat untuk diolah. Dalam Penelitian ini, peneliti

menyebarkan kuisisioner secara langsung ke 10 kelompok penjual jajanan (tersebut diatas) di kota Yogyakarta dengan sampel penelitian diambil dari 20 penjual pada masing-masing kelompok sebagai responden. Peneliti menyebarkan 30 kuisisioner pada tahap pertama untuk mengambil sampel sebagai analisa Validitas dan Reabilitas Penelitian, kemudian selanjutnya menyebarkan 230 kuisisioner dan mendapat kembalian kuisisioner sebanyak 200 hasil kuisisioner yang sudah di jawab oleh responden. Kuisisioner yang telah dikembalikan kepada peneliti selanjutnya dinilai satu per satu menggunakan skala likert untuk mendapatkan input data yang akan diolah (input data terlampir).

Dari hasil kuisisioner yang disebarakan sebanyak 200 kuisisioner memberikan informasi tetang beberapa data sebagai berikut:

Tabel 2 Data Berdasarkan Kependudukan

No	KTP	Domisili	Jumlah	Prosentase
1	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta	20	10%
2	DIY	Kota Yogyakarta	120	60%
3	Luar DIY	Kota Yogyakarta	60	30%
TOTAL			200	100%

Tabel 3 Data Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	70	35%
2	SMP	80	40%
3	SMA	40	20%
4	D3	8	4%
5	S1	2	1%
		200	100%

Tabel 4 Data Berdasarkan Lokasi Jualan

No	Lokasi	Jumlah	Prosentase
1	Sekolah	85	42,5%
2	Tempat Wisata	79	39,5%
3	Umum	22	11%
4	Rumah sendiri	14	7%
TOTAL		200	100%

Analisis data

Analisis Regresi Berganda

Regresi Berganda didasari pada hubungan fungsional maupun hubungan kausal dari 5 variabel independen yang ada dengan 1

variabel dependen. Hasil Analisa Regresi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut :

Tabel 5 Coefficient Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.483	1.729		.858	.392
	Sumber Daya Manusia	.129	.034	.187	3.761	.000
	Peran Pemerintah	.331	.035	.492	9.565	.000
	Modal Usaha	.160	.030	.267	5.320	.000
	Kemitraan	.165	.031	.267	5.289	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Usaha

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Diketahui:

$$\alpha = 1,483$$

$$\beta_1 = 0,129$$

$$\beta_2 = 0,331$$

$$\beta_3 = 0,160$$

$$\beta_4 = 0,165$$

Maka Persamaan Regresi Berganda yang dihasilkan dari analisis ini adalah:

$$Y = 1,483 + 0,129X_1 + 0,331X_2 + 0,160X_3 + 0,165X_4$$

Hipotesis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. B_0 = Constant yang merupakan rata-rata nilai Y pada saat $X_1, X_2, X_3, ,$ dan $X_4 = 0$ artinya Meskipun tanpa adanya variable-variabel Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, dan Kemitraan, vzriabel Kemandirian Usaha para pelaku Usaha Mikro sudah ada dan terbukti positif sebesar 1,483
2. B_1 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X_1 (Sumber Daya Manusia) dengan menganggap $X_2, X_3,$ dan $X_4,$ konstan artinya jika variabel Sumber Daya Manusia positif (0,129) maka akan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha.
3. B_2 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X_2 (Peran Pemerintah) dengan menganggap $X_2, X_3, ,$ dan X_4 konstan artinya jika Peran Pemerintah positif (0,331) maka akan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha
4. B_3 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X_3 (Modal Usaha) dengan menganggap $X_1, X_2,$ dan $X_4,$ konstan artinya jika Modal Usaha positif (0,160) maka akan berpengaruh terhadap positif terhadap Kemandirian Usaha

5. B_4 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X_4 (Kemitraan) dengan menganggap X_1 , X_2 , dan X_3 , konstan artinya jika Kemitraan positif (0,165) maka akan berpengaruh terhadap positif terhadap Kemandirian Usaha

Hipotesisnya:

$$H_0 : B_0 = 0$$

$$H_1 : B_1 \neq 0$$

Jadi berdasarkan Analisis Regresi Berganda dihasilkan $H_1: B_0 \neq 0$ maka H_1 dinyatakan diterima dan menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dari keempat variable yaitu Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan terhadap Kemandirian Usaha.

Analisis Uji Hipotesis

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji validitas isi (content validity) yang menunjukkan seberapa besar item-item instrument mewakili indikator yang diukur.

Tabel 6 Output Item Total Correlations pada Variabel Sumber Daya Manusia

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SDM1	24.03	13.895	.571	.823
SDM2	24.17	12.557	.819	.776
SDM3	24.13	13.223	.713	.798
SDM4	24.40	11.559	.616	.825
SDM5	24.37	15.137	.406	.850
SDM6	24.23	13.082	.654	.807

Tabel 7 Output Item Total Correlations pada Variabel Peran Pemerintah

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PEM1	25.20	10.648	.531	.803
PEM2	25.20	9.062	.839	.734
PEM3	25.07	10.202	.652	.779
PEM4	25.27	9.926	.641	.779
PEM5	25.27	10.892	.563	.797
PEM6	25.33	10.575	.371	.848

**Tabel 8 Output Item Total Correlations pada Variabel
Modal Usaha**

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
UM1	23.53	18.671	.592	.752
UM2	23.47	17.154	.728	.715
UM3	23.50	19.845	.445	.789
UM4	23.37	20.516	.661	.748
UM5	23.77	21.289	.394	.796
UM6	23.70	19.183	.526	.769

**Tabel 9 Output Item Total Correlations pada Variabel
Kemitraan**

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KMT1	23.67	10.644	.874	.826
KMT2	23.57	11.495	.611	.866
KMT3	23.63	10.654	.822	.832
KMT4	23.70	10.907	.650	.861
KMT5	23.70	10.700	.737	.845
KMT6	23.57	11.702	.462	.895

Tabel 10 Output Item Total Correlations pada Variabel Kemandirian Usaha

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
MDR1	23.97	14.171	.477	.865
MDR2	23.87	12.395	.927	.791
MDR3	23.87	14.257	.486	.863
MDR4	23.90	13.334	.834	.812
MDR5	23.87	12.947	.676	.830
MDR6	23.87	11.292	.654	.845

Nilai Output pada Total Correlation adalah r hitung, selanjutnya dibandingkan dengan r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data $n = 30$ maka diperoleh r tabel adalah sebesar 0,361

Kesimpulannya adalah data korelasi yang dihasilkan valid jika berada diatas r tabel (semua variabel menghasilkan corrected item-total correlation > dari 0,361) dan data korelasi tidak valid jika dibawah dari r tabel (tidak di temukan). Dengan demikian dapat digaris bawahi bahwa data yang digunakan dalam analisa adalah data yang valid.

Tabel 11

Correlations

		Sumber Daya Manusia	Peran Pemerintah	Modal Usaha	Kemitraan	Kemandirian Usaha
Sumber Daya Manusia	Pearson Correlation	1	.072	-.109	-.023	.186**
	Sig. (2-tailed)		.314	.123	.741	.008
	N	200	200	200	200	200
Peran Pemerintah	Pearson Correlation	.072	1	.167*	.236**	.613**
	Sig. (2-tailed)	.314		.018	.001	.000
	N	200	200	200	200	200
Modal Usaha	Pearson Correlation	-.109	.167*	1	.033	.337**
	Sig. (2-tailed)	.123	.018		.640	.000
	N	200	200	200	200	200
Kemitraan	Pearson Correlation	-.023	.236**	.033	1	.388**
	Sig. (2-tailed)	.741	.001	.640		.000
	N	200	200	200	200	200
Kemandirian Usaha	Pearson Correlation	.186**	.613**	.337**	.388**	1
	Sig. (2-tailed)	.008	.000	.000	.000	
	N	200	200	200	200	200

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Validitas ang dihasilkan dapat dibuktikan melalui uji Korelasi dan dihasilkan hubungan yang kuat antara masing-masing variabel independent dengan variabel dependent yang masing-masing menghasilkan parseon correlation 1.

b. Uji Realibilitas

Untuk melakukan Uji Reabilitas Instrumen menggunakan output yang telah diuji validitasnya dan diambil 30 sampel kuisisioner sehingga menghasilkan nilai alpha pada masing-masing item yaitu pada kolom Cronbach's if item delete. Sedangkan untuk koefisien Cronbach's Alpha secara simultan atas 4 item ditunjukkan pada tabel reliability coefficients yang berada dibaw ahnya (Gendro Wiyono, 2011)

Tabel 12 Output Reability Analisis pada variabel Sumber Daya Manusia

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
SDM1	24.03	13.895	.571	.823
SDM2	24.17	12.557	.819	.776
SDM3	24.13	13.223	.713	.798
SDM4	24.40	11.559	.616	.825
SDM5	24.37	15.137	.406	.850
SDM6	24.23	13.082	.654	.807

Tabel 13 Output Reability Analysis pada variabel Peran Pemerintah

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PEM1	25.20	10.648	.531	.803
PEM2	25.20	9.062	.839	.734
PEM3	25.07	10.202	.652	.779
PEM4	25.27	9.926	.641	.779
PEM5	25.27	10.892	.563	.797
PEM6	25.33	10.575	.371	.848

Tabel 14 Output Reability Analysis pada variabel Modal Usaha

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
UM1	23.53	18.671	.592	.752
UM2	23.47	17.154	.728	.715
UM3	23.50	19.845	.445	.789
UM4	23.37	20.516	.661	.748
UM5	23.77	21.289	.394	.796
UM6	23.70	19.183	.526	.769

**Tabel 15 Output Reability Analysis pada variabel
Kemitraan**

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KMT1	23.67	10.644	.874	.826
KMT2	23.57	11.495	.611	.866
KMT3	23.63	10.654	.822	.832
KMT4	23.70	10.907	.650	.861
KMT5	23.70	10.700	.737	.845
KMT6	23.57	11.702	.462	.895

**Tabel 16 Output Reability Analysis pada variabel
Kemandirian Usaha**

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
MDR1	23.97	14.171	.477	.865
MDR2	23.87	12.395	.927	.791
MDR3	23.87	14.257	.486	.863
MDR4	23.90	13.334	.834	.812
MDR5	23.87	12.947	.676	.830
MDR6	23.87	11.292	.654	.845

**Tabel 17 Output Reability Analysis pada variabel
Kemandirian Usaha**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item
1	Sumber Daya Manusia	.840	6
2	Peran Pemerintah	.820	6
3	Modal Usaha	.794	6
4	Kemitraan	.876	6
5	Kemandirian Usaha	.859	6

Output dari Reability Analysis tidak lain adalah Item-Total Statistics, yang menghasilkan nilai- nilai Alpha pada kolom Cronbach/s Alpha If Item deleted, untuk masing-masing Item dan menghasilkan nilai Alpha Simultan/ komposit pada tabel Reability Statistik yang berada dibawahnya. Nilai Alpha ini dibandingkan dengan r tabel yang dicari dengan signifikancy 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 30 diperoleh nilai r tabel 0,361. Tampak bahwa Alpha yang dihasilkan lebih besar dari pada r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai item secara parsial maupun secara komposit dinyatakan reliabel.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Hasil Keluaran untuk Uji F menggunakan Alat Analisis Independen ANOVA^a

Tabel 18**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	630.097	4	157.524	55.058	.000 ^a
	Residual	557.903	195	2.861		
	Total	1188.000	199			

a. Predictors: (Constant), Kemitraan, Sumber Daya Manusia, Modal Usaha, Peran Pemerintah

b. Dependent Variable: Kemandirian Usaha

Hasil keluaran ANOVA menunjukkan bahwa Degree of Freedom yang digunakan adalah 4 dengan Probabilitas 0,05 dan $n = 200$ maka dalam F tabel diperoleh nilai sebesar 2,26 sedangkan F hitung yang dihasilkan sebesar 55,058 sehingga F Hitung lebih besar dari pada F tabel ($F_{hitung} > F_{tabel}$)

Dengan demikian sehingga dapat disimpulkan bahwa;

$$H_0 = 0$$

$$H_a \neq 0$$

H_a diterima karena terdapat hubungan saling memberikan pengaruh antara variable independent (bebas) dengan variable dependent (terikat). Dalam hal ini semakin besar F Hitung maka semakin sama populasi yang digunakan.

Untuk memperkuat keluaran dari ANOVA maka perlu di analisa bagaimana analisa Diskriptifnya karena dari analisa ini akan di ketahui jika mean dari seluruh variabel adalah sama maka H_a dinyatakan diterima. Dan tampak dalam tabel 6 bahwa mean yang dihasilkan semua sama pada keempat Variabel independen maksimalnya yaitu 36

Tabel 19**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sumber Daya Manusia	200	20	36	29.27	3.541
Peran Pemerintah	200	20	36	29.51	3.631
Modal Usaha	200	16	36	28.90	4.080
Kemitraan	200	20	36	28.86	3.962
Kemandirian Usaha	200	17	30	24.40	2.443
Valid N (listwise)	200				

d. Uji T

Uji T dapat juga dikatakan sebagai Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan.

Tabel 20**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.483	1.729		.858	.392
Sumber Daya Manusia	.129	.034	.187	3.761	.000
Peran Pemerintah	.331	.035	.492	9.565	.000
Modal Usaha	.160	.030	.267	5.320	.000
Kemitraan	.165	.031	.267	5.289	.000

a. Dependent Variable: Kemandirian Usaha

Bentuk pengujianya adalah sebagai berikut:

$H_a = B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 \neq 0$ artinya ada pengaruh bermakna antara X dengan Y dengan menggunakan tingkat keyakinan 172,9% (lebih dari 100%) kemudian dibandingkan t hitung dengan t tabel. Besarnya tingkat keyakinan akan berpengaruh

terhadap nilai Z (nilai t). Semakin besar tingkat keyakinan maka akan semakin besar pula nilai t (Gendro Wiyono, 2011). Karena t tabel yang dihasilkan pada probabilitas 0,05 uji 2 sisi dan N 200 adalah 1,6525 sedangkan pada probabilitas 0,025 uji satu sisi adalah 1,9719, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa:

T hitung > t tabel

Sehingga hipotesa yang menjadi kesimpulannya adalah

$$H_0 = 0$$

$$H_a \neq 0$$

H_a diterima bahwa keempat variable independent (bebas) memberikan pengaruh terhadap variable dependent (terikat).

Hasil Analisis

Hasil dari Analisis Regresi yang dilakukan dengan menggunakan beberapa Uji hipotesis menghasilkan Hipotesa sebagai berikut:

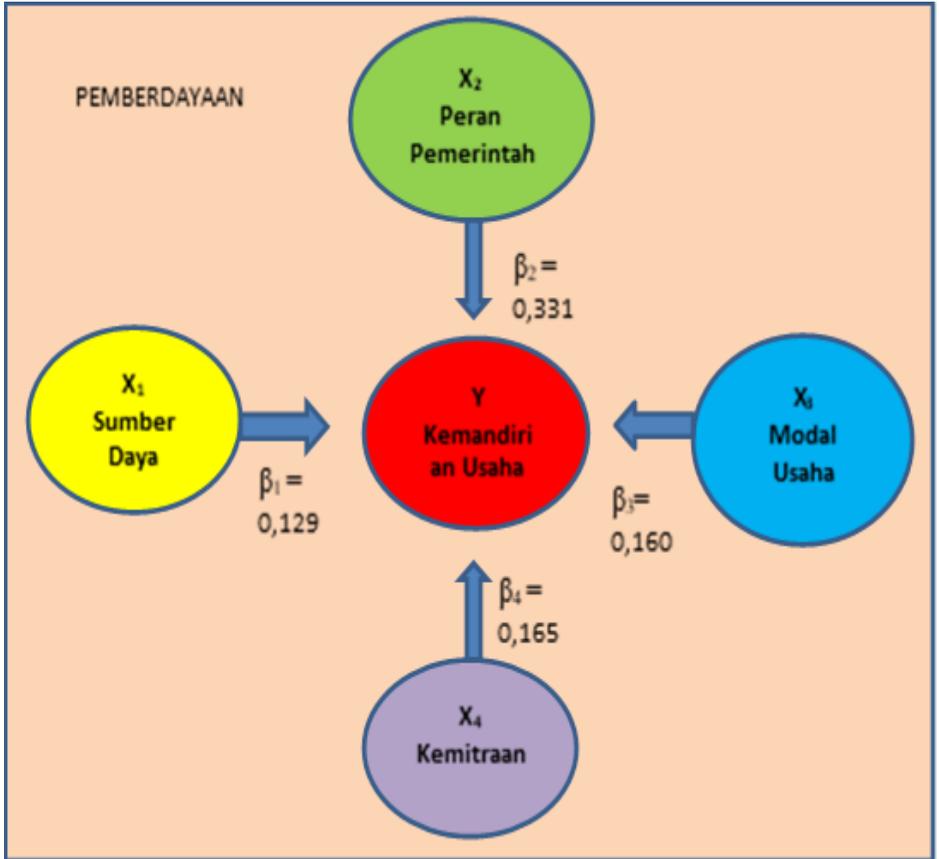
1. Variabel Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh positif terhadap Variabel Kemandirian Usaha dengan B_1 positif dan t hitung serta F hitung lebih besar dari pada t tabel dan F tabel.
2. Variabel Peran Pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap Variabel Kemandirian Usaha dengan B_2 positif dan t hitung serta F hitung lebih besar dari pada t tabel dan F tabel.

3. Variabel Modal Usaha memberikan pengaruh positif terhadap Variabel Kemandirian Usaha dengan B_3 positif dan t hitung serta F hitung lebih besar dari pada t tabel dan F tabel.
4. Variabel Kemitraan memberikan pengaruh positif terhadap Variabel Kemandirian Usaha dengan B_4 positif dan t hitung serta F hitung lebih besar dari pada t tabel dan F tabel

Keempat Variabel Independen (Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan) secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Kemandirian Usaha terbukti bahwa correlasi yang dihasilkan adalah 1 dengan kata lain hubungannya sangat kuat.

Model

Gambar 3 Model Pemberdayaan Usaha Mikro



Dari hasil analisa penelitian ini memberikan gambaran model pemberdayaan usaha mikro yang dapat diterapkan melalui keempat variabel (Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, dan Kemitraan) harus benar-benar dimaksimalkan

terbukti bahwa β yang dihasilkan positif artinya variabel-variabel pengaruh kuat mempengaruhi variabel independent (Kemandirian Usaha). Pertama, Variabel Sumber Daya Manusia dengan $\beta_1 = 0,129$ jika pemberdayaan yang dilakukan semakin baik dan tepat pada sasaran maka Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro akan semakin baik. Kedua, Variabel Peran pemerintah menunjukkan pengaruh yang positif kuat dengan $\beta_2 = 0,331$ mempengaruhi Kemandirian Usaha, jika upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah tepat guna dan tepat sasaran pada pelaku usaha mikro terutama pelaku usaha jajanan maka akan sangat berperan dalam mempengaruhi Kemandirian usaha. Ketiga, Variabel Modal Usaha dengan $\beta_3 = 0,160$ memberikan pengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha dengan demikian peran pemberdayaan melalui Variabel ini harus benar-benar di maksimalkan fungsinya sehingga benar-benar berpengaruh langsung terhadap para pelaku usaha mikro jajanan sehingga mereka akan mampu memiliki Kemandirian Usaha secara finansial. Variabel keempat, adalah Variabel Kemitraan dimana $\beta_4 = 0,165$ memberikan pengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha maka jika peran kemitraan ini di maksimalkan akan banyak memberikan sumbangan terhadap Kemandirian Usaha bagi para pelaku usaha mikro khususnya kemitraan yang dibangun para pelaku usaha jajanan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kenyataan dilapangan dan kemudian berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan dan analisis yang dilakukan dari hasil analisa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dari sisi Sumber Daya Manusia masih harus ditingkatkan karena SDM yang dimiliki para pelaku usaha mikro (penjual jajanan) memang relative rendah, data dari hasil kuisisioner berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan hasil tingkat pendidikan SD sebesar 35%, SMP 40%, SMA 20% dan D3 4%, dan S1 1% kondisi ini berpengaruh terhadap Kemandirian Usaha dalam artian latar belakang pendidikan yang rendah mengakibatkan berbagai persoalan seperti:
 - a. Kekurangmampuan akses dan perluasan pangsa pasar;
 - b. Kekurangmampuan akses pada sumber-sumber pendanaan, khususnya bank;
 - c. Keterbatasan akses pada informasi;
 - d. Kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan alih teknologi; dan
 - e. Kelemahan dalam pengelolaan organisasi dan manajemen.dan

- f. Kurang peduli terhadap lingkungan termasuk masalah kesehatan yang ditimbulkan dari praktek penjualan yang salah.
2. Pemberdayaan melalui Peran Pemerintah sangat berpengaruh terhadap Kemandirian Usaha Karena itu Peran Pemerintah itu perlu dimaksimalkan seperti melalui :
 - a. Campur tangan pemerintah dalam membangkitkan semangat wirausaha yang benar;
 - b. Peran Pemerintah dalam memberikan banyak kemudahan dari berbagai peraturan ataupun birokrasi yang ada;
 - c. Peran Pemerintah memberikan kemudahan pelaku usaha mikro menikmati fasilitas umum yang mampu menunjang berlangsungnya usaha
 - d. Peran Pemerintah dalam pendidikan yang dapat menambah banyak pengetahuan tentang lingkungan eksternal seperti lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan perlindungan keamanan dari pemerintah.
 - e. Peran pemerintah melalui dinas kesehatan semakin memantau kesehatan dan kondisi barang jualan apakah layak jual atau tidak termasuk bagaimana mereka mengelola dagangan kadaluarsa.
3. Pelaku Usaha Mikro (penjual jajanan) kurang memiliki Modal Usaha yang cukup untuk mengembangkan usahanya karena

iu Pemberdayaan melalui Modal Usaha akan mempengaruhi Kemandirian usaha, kondisi ini bisa terjadi karena:

- a. Tidak adanya akses langsung para pelaku usaha mikro terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) maupun non bank;
- b. Kurangnya dukungan modal berupa pembiayaan dan penjaminan pinjaman modal usaha terkadang mengakibatkan kurangnya kepedulian terhadap mutu dan produktivitas usaha sehingga menjadi terhambat, mutu produk yang kadang seadanya karena konsep berpikir asal mendapat untung saja.

4. Pemberdayaan melalui Kemitraan yang dilakukan para pelaku usaha mikro (penjual jajanan) memberikan pengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha, namun hal ini masih banyak hambatan karena:

- a. Keinginan yang rendah dari pelaku usaha mikro untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pelaku usaha lain baik seformat maupun dengan format di atasnya;
- b. Memiliki pola pikir bahwa dengan berorganisasi mereka beranggapan akan membuang-buang waktu saja
- c. Sudah merasa cukup dengan apa yang dijalani selama ini.

Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya bagi Dinas yang terkait untuk :

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus melakukan pengecekan langsung dan rutin ke penjaja jajanan berkitan dengan masalah kesehatan makanan yang dijual belikan, termasuk makanan kadaluarsa dan lokasi tempat jualan yang tidak mengganggu kepentingan umum.
2. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta harus meningkatkan pelatihan tentang berbagai hal yang mereka perlukan untuk semakin meningkatkan kualitas SDM dengan sedikit paksaan agar mereka mau hadir.
3. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus melarang dengan tegas penjualan makanan jika terbukti tidak sehat
4. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta harus semakin memberikan banyak jalur kemudahan dalam pemberian pinjaman dana dengan jaminan dari pemerintah kota Yogyakarta
5. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta harus membantu memberikan wadah jika memungkinkan membentik Asosiasi bagi kelompok usaha jajanan agar semua saran diatas dapat

tersampaikan dengan lebih mudah sehingga Kemandirian Usaha semakin dapat dirasakan.

6. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta harus mengeluarkan Sertifikasi Layak atau minimal terdaftar dan diberikan bukti kelayakan jual dari dinas kesehatan terhadap para Penjaja Jajanan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta, salah satu contoh secara teknis dengan penampilan gerobak yang bersih dan menarik, penampilan penjual yang bersih dengan menggunakan celemek dan sarung tangan
7. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta harus menghimbau kepada pihak-pihak sekolah secara lebih luas agar lebih memprioritaskan adanya kantin sehat
8. Dinas Pendidikan dan Kesehatan Kota Yogyakarta secara bersama-sama harus dapat menghimbau kepada pihak sekolah untuk benar-benar memantau dan mentertibkan para penjaja jajanan di depan sekolah dan akan lebih baik lagi jika hanya kepada para penjual jajanan yang memperoleh surat ijin resmi dari sekolah yang bisa berjualan di depan sekolah yang bersangkutan, karena berdasarkan survey sebanyak 42,5% penjual berada dilingkungan sekolah.
9. Pihak Sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMU harus berani mengikuti jejak sekolah-sekolah sebelumnya dalam upaya tegas membuat kantin sehat dengan mengajak partisipasi

orang tua mengisi kantin dengan buatan mereka dengan tanggung jawab penuh bahwa makanan yg dibuat adalah makanan sehat.

10. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama BPOM secara simultan melakukan tes kesehatan makanan terhadap makanan yg dijual oleh usaha jajanan sehingga akan tercipta rasa takut jika menjual makanan tidak sehat/ berbahaya, karena ancaman sanksi akan diberikan jika pelanggaran ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berry, A.E Rodriguez and H. Sandeem (2001)**, small and medium Enterprises Dynamic in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies 37 (3): 363-384
- BPS, 2013**, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta
- Chew, Rosalind (1996)**, safety nets for Entrepreneurship in Singapore, dalam Low Aik Meng dan Tan Wee Liang (ed) Entrepreneurs, Entrepreneurshp and Enterprising Culture, Addison-Wesley Publishing Co., Singapore
- Gujarati, Damodar (1995)**, Basic econometrics, Mc Graw -Hill
- Hafsah, M. Jafar (2000)**, Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Hill, Hal (2000)**, Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesiasine 1970, Oxford University Press, Singapore
- Porter, Michael E (1997)**, Competitive Strategy, The Pree Press, New York
- Satrio, Awal Nugroho (2006)**, Kew irausahaan Berbasis Spiritual, Penerbit Kayon, Yogyakarta

Sumarsono, Sonny (2003) Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta

Undang-undang no 20 th 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Wiyono, Gendro (2011), Merancang Penelitian dengan Alat Analisis SPSS _{17.0} dan SmartPLS _{2.0}

Yusi, Syahirman M. dan Rini Zakaria (2005), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UpayaPemberdayaan Industri kecil Perkotaan di Kotamadia Palembang, Laporan Penelitian atas biaya P5D Depdiknas, Politeknik Negeri Sriwijaya

_____, <http://www.jogjakota>



STIE Widya Wiwaha
stiew.w.ac.id

ISBN 978-602-51174-7-3

